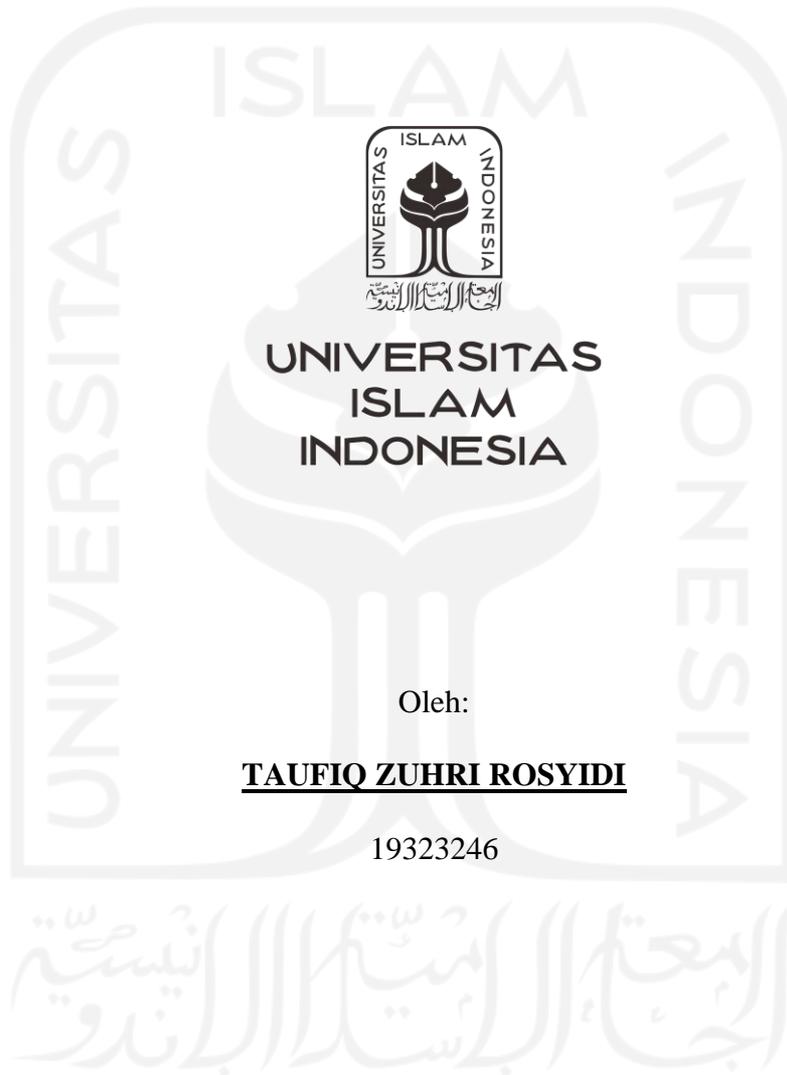


ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP

TRAKTAT PERTAHANAN AUKUS 2021-2022

SKRIPSI



Oleh:

TAUFIQ ZUHRI ROSYIDI

19323246

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP

TRAKTAT PERTAHANAN AUKUS 2021-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

TAUFIQ ZUHRI ROSYIDI

19323246

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Traktat Pertahanan AUKUS 2021-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.IP., MA.

Dewan Penguji

1. Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
3. Hangga Fathana, S.IP., B. Int.St., M.A.

Tanda Tangan

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 30 Januari 2023



Taufiq Zuhri Rosyidi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Bapak Dahlan Rosidi, Ibu Siti Rukayah dan Adik Saya.

Terimakasih atas doa, restu, kasih sayang dan kepercayaan yang terus diberikan selama ini semoga segala upaya yang telah dicurahkan menjadi berkah.

Bapak Willi Ashadi S.H.I, M.A

Terimakasih atas doa, restu serta suport yang telah diberikan. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama membimbing. Semoga



HALAMAN MOTTO

“Pragmatically Pain, Pragmatically Joy”

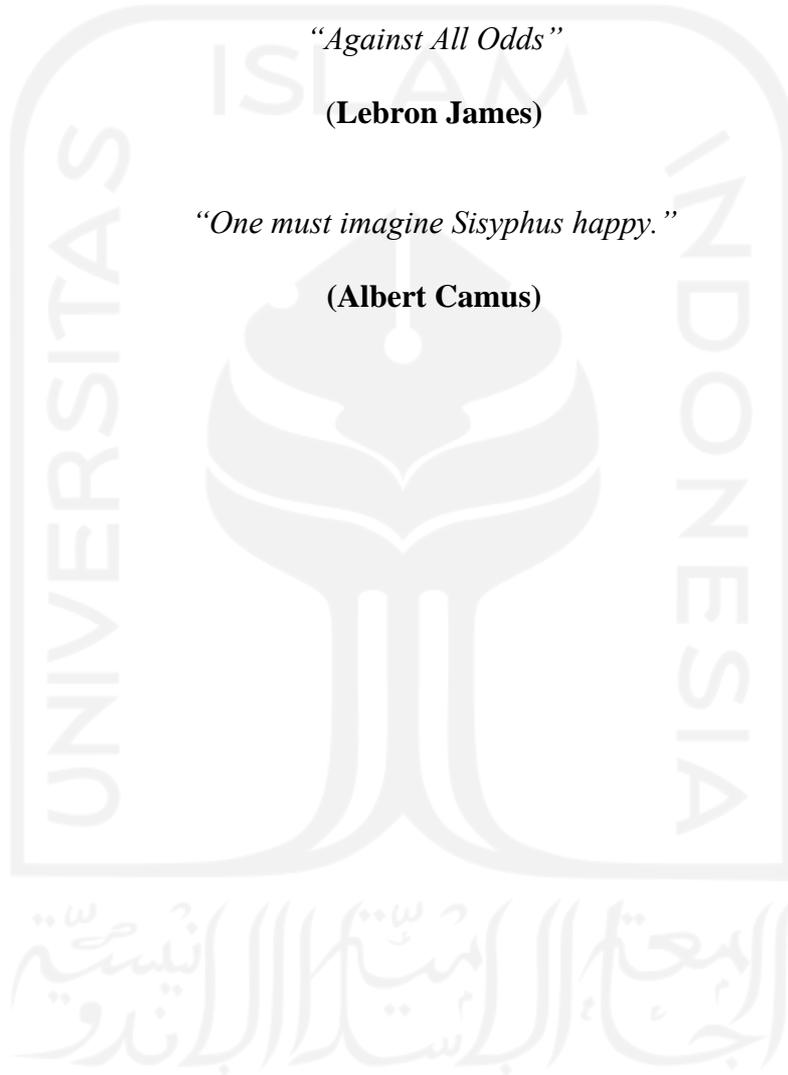
(Taufiq Zuhri Rosyidi)

“Against All Odds”

(Lebron James)

“One must imagine Sisyphus happy.”

(Albert Camus)



DAFTAR ISI

SKRIPSI	I
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN MOTTO	VI
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	IX
DAFTAR SINGKATAN	X
ABSTRAK	XI
ABSTRACT	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
Bab II	16
Konteks AUKUS terhadap Politik Internasional di Kawasan Indo-Pasifik	16
2.1. Dinamika kerjasama AUKUS	17
2.2. Tujuan traktat pertahanan AUKUS	20
2.2.1. Amerika Serikat (AS)	22
2.2.2. Britania Raya (BR)	24
2.2.3. Australia (AU)	26

2.3.	AUKUS dan pengaruhnya terhadap geopolitik Indo-Pasifik	29
2.3.1.	Tiongkok	29
	Gambar 2. Peta Wilayah Klaim-Klaim Negara di LNU	30
2.3.2.	ASEAN	32
BAB III		36
	Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Traktat Pertahanan AUKUS 2021-2022 dalam Perspektif <i>Decision Making</i>	36
3.1.	Faktor Lingkungan Pengambilan Keputusan	39
3.2.	Faktor Psikologi	40
3.3.	Faktor Internasional	45
3.3.1.	Deterrence	45
3.3.2.	Arm Races	50
3.4.	Faktor Domestik (Kepentingan Ekonomi)	54
3.4.1.	Indonesia dengan AS	55
3.4.2.	Indonesia dengan Tiongkok	57
BAB IV		61
	KESIMPULAN & SARAN	61
4.1.	Kesimpulan	61
4.2.	Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 1. Peta Teori Foreign Policy Decision Making	10
Gambar 2. Peta Wilayah Klaim-Klaim Negara di LNU	30
Tabel 1. Variabel Aplikasi Teori FPDM dalam Analisis Kebijakan Indonesia terhadap Traktat Pertahanan AUKUS 2021-2022	38
Gambar 3. Peta Jarak antara LANUD Raden Sadjad di Kabupaten Natuna dengan Salah Satu Pangkalan Militer Tiongkok di LNU, Kepulauan Fiery Cross Reef.	50
Gambar 4. Peta Kemampuan Kapal Selam Bertenaga Nuklir Berpatroli di Wilayah Indo-Pasifik	51
Grafik 1. Realisasi PMA pada Triwulan II tahun 2022	60
Gambar 5. Mind Map Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Traktat Pertahanan AUKUS 2021-2022	62

DAFTAR SINGKATAN

APCI	: Air Products and Chemical Incs
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BR	: Britania Raya
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
FPDM	: Foreign Policy Decision Making
IMIP	: PT Indonesia Morowali Industrial Park
IPEF	: Indo-Pacific Network
KEMENLU	: Kementerian Luar Negeri
KEMHAN	: Kementerian Pertahanan
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LANUD	: Pangkalan Angkatan Udara
LNU	: Laut Natuna Utara
MENHAN	: Menteri Pertahanan
MENLU	: Menteri Luar Negeri
MKBP	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPT	: Non-proliferation Treaty
PMA	: Penanaman Modal Asing
POLUGRI	: Politik Luar Negeri
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat pada kehadiran AUKUS dalam kawasan Indo-Pasifik dimana Indonesia hadir secara fisik teritorinya. Posisi Indonesia ini menjadi fokus utama penelitian dengan menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap traktat pertahanan AUKUS tahun 2021-2022 dengan menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri (FPDM) oleh Alex Mintz dan Karl Derouen. Secara garis besar Indonesia melalui kabinet yang berjalan, Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, menjadikan prinsip bebas aktif sebagai prinsip poligrinya. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengadopsi prinsip ini kemudian dimodifikasi menjadi program prioritas diplomasi "4+1". Prioritas yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi tersebut terdapat dua prioritas yang berkorelasi dengan faktor-faktor teori FPDM. Secara kebijakan pertahanannya, Indonesia tetap aktif berupaya melakukan diplomasi untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kestabilan dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik. Namun, disatu sisi Indonesia juga memprioritaskan daerah kedaulatannya dengan cara melakukan pembelian alutsista dan meningkatkan pagu belanja kemhan untuk mencegah dampak eskalasi di kawasan Indo-Pasifik. Secara kepentingan ekonomi Indonesia sebenarnya Tiongkok memiliki nilai realisasi investasi di Indonesia lebih besar daripada AS.

Kata Kunci: Kebijakan Indonesia terhadap AUKUS, AUKUS, AS, Tiongkok, Indo-Pasifik.

ABSTRACT

The background of this research is the presence of AUKUS in the Indo-Pacific as well as Indonesian territory. Therefore, Indonesia's position towards the AUKUS defense pact 2021-2022 would be the main focus of analysis in this paper. using Alex Mintz and Karl Derouen's foreign policy decision making (FPDM). As an outline, Indonesia through their ruling cabinet, Indonesia Maju Cabinet 2019-2024 period would use "bebas aktif" as the principle of their foreign policy. President Joko Widodo and Vice President Ma'ruf Amin through Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi will adopt and enhance this principle into "4+1" programs of diplomatic priorities. Among all those priorities there are two related to the factors of the FPDM's theory. Defensively speaking, Indonesia was actively performing diplomatic action to increase awareness of peace and stabilization of the Indo-Pacific region. Henceforth on the other side, Indonesia will always prioritize its territory when it comes to its sovereignty through procuring several defensive equipment and increasing expenditure of the Ministry of Defense which aims to deter the impact of an escalation in the region. Economically speaking, Indonesia has a larger volume than China when it comes to investment realization value rather than the US.

Keywords: *Indonesia policy towards AUKUS, AUKUS, US, China Indo-Pacific.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlu diamati kembali bahwa tendensi keamanan tradisional kembali meningkat akhir-akhir ini. Terutama pasca meningkatnya intensitas tensi antara Amerika dan Tiongkok yang diawali dari perang dagang. Kemunculan Tiongkok ini sontak banyak yang menghubungkan di ancang-ancang akan menjadi hegemoni baru menggantikan Amerika Serikat yang telah lama menjadi negara adidaya dunia pertama. Namun tentu saja Amerika Serikat tidak tinggal diam. Keberadaan Tiongkok menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoninya. Termasuk seperti terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menyebabkan perdagangan Internasional 2019 silam (CNN Indonesia 2020). Perang dagang ini tentu saja mengejutkan seluruh dunia. Pasalnya hampir setelah runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1991 hampir tidak ada sama sekali negara yang dapat menyaingi hegemoni Amerika Serikat di segala sektor. Tensi ini berlanjut sampai pada perebutan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik.

Kawasan Indo-pasifik yang terbentang dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik menjadi wilayah yang strategis dalam aspek politik Internasional (Priatna 2019). Kawasan ini menjadi tempat pelayaran internasional dan juga menyimpan kekayaan mineral yang tinggi. Salah satu kawasan yang strategis adalah Laut Natuna Utara (LNU). LNU telah menjadi jalur pelayaran Internasional historis dunia. Tidak hanya itu juga laut yang terletak di utara Samudra Pasifik ini

juga memiliki kekayaan sumber daya baik alam maupun mineral yang tinggi. Tiongkok sendiri beberapa kali terlibat konflik dengan negara-negara terutama mereka yang berbatasan langsung dengan LNU. Konflik laut natuna utara ini berkaitan dengan operasi militer Tiongkok yang dilakukan terhadap pulau-pulau kecil yang berada di LNU. LNU sendiri menjadi wilayah yang sarat akan konflik dimana baik Tiongkok, Malaysia, Filipina, Vietnam, Indonesia dan Brunei sama-sama mengklaim memiliki bagian daripada wilayah tersebut. Pengklaiman wilayah tersebut oleh Tiongkok didasari oleh *nine-dash line* atau sembilan garis putus yang berdasarkan pada sejarah penaklukan Tiongkok. Tentu saja pengakuan ini mengalami gejolak di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Banyak yang menganggap bahwa usaha Tiongkok dalam mengklaim LNU ini merupakan jerih payah untuk mempertahankan dan memperkuat hegemoninya.

Melihat hal ini, Amerika Serikat sebagai rivalitas terdekatnya melihat bahwa LNU merupakan wilayah yang krusial dalam meluaskan hegemoninya. LNU dapat membantu Amerika Serikat tidak hanya dalam sektor keamanan, melainkan geopolitik dan ekonomi juga. Rivalitas kedua negara ini berujung pada perebutan hegemoni kawasan di Laut Natuna Utara. Amerika Serikat melihat dengan ini dibawah presiden Joe Biden mengeluarkan kebijakan pakta pertahanan trilateral AUKUS. AUKUS sendiri diambil dari ketiga negara anggota pakta ini yaitu Amerika Serikat (AS), Britania Raya (UK) dan Australia (AU). Perjanjian ini diumumkan dalam konferensi virtual yang dilakukan pada 21 September 2021 setelah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, Perdana Menteri Britania Raya, Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengadakan pertemuan. Pakta pertahanan ini memiliki tujuan terdekat *transfer technology* yang dilakukan

oleh Amerika Serikat kepada Australia dalam membuat kapal selam bertenaga nuklir (Hakim 2021).

Dengan hal ini membuat Australia memilih AUKUS dan memutuskan kontrak yang sudah ditandatangani dengan Prancis beberapa jam sebelum peresmian terkait pembuatan dua belas unit kapal selam konvensional atau bertenaga disel. Kesepakatan yang dibuat balik tahun 2016 tersebut digadag-gadag membatalkan kontrak yang telah dibuat dengan Prancis sekitar 40 miliar dollar atau setara dengan 570 triliun rupiah. Langkah pembatalan kontrak oleh Australia ini sontak membuat Prancis marah. Ini disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya, Jean-Yves Le Drian dengan menyatakan bahwa langkah Australia tersebut sebagai pengkhianat atau menikam dari belakang. Respon yang sama juga ditunjukkan oleh Prancis Florence selaku Menhan Prancis dengan menyatakan bahwa Prancis lebih berhati-hati dalam berhubungan dengan AS pasca diratifikasinya AUKUS (Hutapea 2021).

Melihat diratifikasinya pakta pertahanan ini, Tiongkok memberikan respon yang cukup sentimentil. China yang terlebih dahulu menunjukkan hegemoninya di kawasan LCS menunjukkan sikap yang menolak keras adanya pakta pertahanan AUKUS ini. Ini dapat dilihat dari statement Menteri Luar Negeri China dan Sekaligus Penasihat Negara Wang Yi dalam pertemuan virtualnya dengan perwakilan Uni Eropa dalam hal Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan, Josep Borrell. Dilansir dari Republika.com Wang menyinggung AUKUS bahwa aksi yang dilakukan merupakan konfrontasi dan dapat membahayakan perdamaian serta stabilitas Internasional (Aini 2021). Sedangkan Wang juga memberikan komparasi dan klaim terhadap apa yang China lakukan yaitu melakukan pembangunan,

mempromosikan perdamaian dan mendorong adanya integrasi regional. Selanjutnya Wang juga menambahkan bahwa AUKUS bisa saja menimbulkan tiga dampak terhadap kestabilan dan perdamaian panggung konstelasi internasional diantaranya pakta ini diduga dapat membangunkan tensi Perang Dingin, persaingan senjata secara sembunyi-sembunyi dan adanya pelanggaran penggunaan nuklir yang telah diatur dalam nuclear for non-proliferation (NPT). Menteri Luar Negeri Tiongkok ini menekankan bahwa AUKUS memberikan efek terhadap negara-negara di Asia Pasifik akan keprihatinan kawasannya (ibid).

Indonesia yang secara geografis terletak persis di tengah kawasan Indo-Pasifik memberikan situasi yang cukup dilematis (Dewi 2021). Terlepas dari pernyataan Menteri Luar Negeri China tersebut sudah seharusnya Indonesia dapat menempatkan keamanan dan kedaulatan negaranya dalam situasi yang serius. Pasalnya Indonesia sendiri berada tepat ditengah dua raksasa yang sedang terlibat yaitu Australia dengan AUKUS-nya di bagian selatan dan Tiongkok di bagian utara. Tidak hanya itu, Indonesia yang memiliki kepentingan diantara dua kubu baik Tiongkok maupun AUKUS. Kondisi ini membuat posisi Indonesia kemudian menjalankan gagasan filosofis politik luar negeri bebas aktifnya.

Prinsip bebas dimaksudkan pada ketidakterlibatan Indonesia terhadap suatu blok tertentu dan aktif merupakan bentuk upaya Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Secara historis Indonesia menjadi negara yang mempromosikan gerakan non-blok. Ini didasari pada prinsip bebas aktif yang diadaptasikan dari pidato Mohammad Hatta pada tanggal 2 September 1948 yang berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang” (Rosa 2022). Kemudian secara resmi telah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 terkait Hubungan Luar

Negeri Indonesia. Maka dalam hal ini pada pemerintahan berjalan periode 2019-2024, Kabinet Maju Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melanjutkan amanah konstitusi tersebut.

Sebagai pengantar penyelenggaraan polugri bebas-aktif dalam kemunculan AUKUS ini, penulis akan mengambil pernyataan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Kabinet Indonesia Maju. Tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2021 pada penyelenggaraan KTT ASEAN-Australia (Bimo 2021). Dalam pertemuan yang dilakukan secara virtual tersebut Presiden Jokowi mengutarakan responnya terkait AUKUS langsung di hadapan PM Australia pada saat itu Scott Morrison. Dalam responnya tersebut Jokowi secara tidak langsung mendukung namun juga mengkritik. Kekhawatiran Jokowi atas AUKUS yaitu dapat menyebabkan semakin tingginya rivalitas di kawasan. Sedangkan ia disatu sisi berharap "Australia dapat melanjutkan keterbukaannya terhadap ASEAN dan menjadi salah satu mitra ASEAN dalam menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik"(ibid).

Kebijakan Jokowi dalam merespon AUKUS ini merupakan salah satu indikasi nilai bebas-aktif. Posisi yang tidak condong dalam satu kubu dengan mengutamakan ketertiban dan kedamaian dunia sebagaimana prinsip dan tujuan polugri Indonesia. Berangkat dari latar belakang ini penulis dalam tulisan memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis sikap kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung netral terhadap pakta pertahanan AUKUS mengingat kontestasi antara AS dan Tiongkok yang cukup sengit dan Indonesia sendiri memiliki kepentingan yang signifikan terhadap kedua negara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan peneliti akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Mengapa Indonesia memutuskan netral dalam traktat Aukus 2020-2021

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian kali ini terdapat beberapa tujuan penelitian itu sendiri yaitu:

1. Menganalisis sikap negara Indonesia terhadap traktat pertahanan AUKUS tahun 2021-2022
2. Menganalisis langkah yang diambil negara Indonesia pasca ratifikasi traktat pertahanan AUKUS tahun 2021-2022
3. Mengetahui dampak traktat pertahan AUKUS tahun 2021-2022 terhadap kebijakan luar negeri Indonesia

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai sikap negara Indonesia yang diambil setelah terjadinya ratifikasi traktat pertahan AUKUS pada tahun 2021 dan tahun 2022 dimana penelitian ini dibuat. Penelitian ini menaruh fokus pada kebijakan luar negeri Indonesia yang dilihat dari konstruksi negara Indonesia itu sendiri. Negara Indonesia juga yang memiliki nilai filosofis politik luar negeri bebas aktif ini akan dijadikan salah satu instrumen analisis yang akan membedah sikap negara Indonesia yang dapat dilihat dari beberapa birokrasi pemerintah Indonesia yang memiliki kredibilitas dalam mewakili pandangan dan sikap Indonesia di kancah Internasional. Penelitian ini juga akan membahas tentang

langkah yang diambil setelahnya. Ini dapat berhubungan dengan kerjasama atau diplomasi yang coba dilakukan dalam mewujudkan adanya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang ditulis Marianne Olivia Delanova yang berjudul Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik tahun 2021 membahas tentang bagaimana Dampak Pakta Pertahanan ini terhadap negara-negara yang berada dalam wilayah Indo-Pasifik. Jurnal ini juga melihat bahwa intensi Amerika Serikat tidak terlepas dari wacana strategi *Free and Open Indo Pacific* (FOIP). Wacana ini adalah salah satu alasan terbentuknya pakta pertahanan AUKUS dimana adanya tujuan *transfer technology* ke Australia sebagai aliansi dan negara yang berada diwilayah Indo-Pasifik memungkikana adanya dorongan penyeimbang kekuatan militer diwilayah tersebut.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa peranan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sangatlah krusial dalam menyikapi adanya dilema dua kekuatan besar yaitu blok Tiongkok maupun Aukus. Jurnal ini juga memberikan saran kepada ASEAN bahwa sudah seharusnya ASEAN mulai menyikapi tantangan keamanan kawasan dengan serius sehingga dapat membuka adanya pola-pola kerjasama terkait dengan keamanan regional Asia Tenggara (Delanova 2021). Jurnal ini menjadi landasan awal dalam melihat fenomena pakta pertahanan AUKUS dan sikap-sikap negara yang beririsan dengannya. Namun dalam jurnal ini pembahasan masih bersifat luas dengan mengambil pusat epistemik negara-negara ASEAN secara mendasar dan tidak mendalam. Terdapat beberapa

point yang akan berguna dalam penelitian kali ini yang terdapat dalam jurnal tersebut seperti tanggapan negara-negara ASEAN terhadap AUKUS, dilematika yang dihadapi negara-negara ASEAN atas konstelasi blok AUKUS dan Tiongkok dan terdapat beberapa tujuan terbentuknya pakta pertahanan AUKUS.

Dalam jurnal yang berjudul “Posisi Indonesia Terhadap Aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) dalam Perspektif Neorealisme” yang ditulis oleh Dyas Bintang Perdana, Rizaldi Dolly Ramasandi dan Setiawan pada tahun 2021 membahas tentang posisi, langkah dan persiapan Indonesia dalam menghadapi pakta pertahanan AUKUS menggunakan kaca mata teori teori neorealisme. Pendekatan neorealisme pada jurnal ini didasari oleh anggapan bahwa teori ini dapat membantu Indonesia untuk melihat fenomena pakta pertahanan AUKUS dengan lebih menyeluruh dan menekankan bahwa power datang dari seluruh akumulasi sumber daya suatu negara yang digunakan untuk melakukan tindakan agresi dan *controlling* ke negara lain (Perdana, Ramasandi, and Setiawan 2021).

Jurnal ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan nanti. Namun terdapat beberapa perbedaan yang krusial dan mencolok antara lain adalah penggunaan teori sebagai perspektif pembedah. Pada jurnal ini para peneliti menggunakan teori Neorealisme sedangkan pada penelitian yang akan peneliti susun nanti menggunakan Konstruktivisme dengan batasan nilai falsafah luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Meskipun sempat disinggung sedikit mengenai sikap politik luar negeri Indonesia namun terdapat perbedaan isi dimana pada penelitian ini para peneliti hanya menulis argumentasi secara general tanpa adanya bukti konkrit baik pernyataan maupun sikap yang diambil oleh birokrat Indonesia. Secara garis besar penelitian ini juga menekankan kajian epistemologi, ontologi dan

aksiologinya pada kekuatan (power) sehingga terdapat bahasan-bahasan tentang kedaulatan geografis dan militer sedangkan penelitian yang akan disusun nanti akan berpusat pada pandangan diplomatis yang menyeluruh baik pasca diratifikasinya pertahanan AUKUS.

Dalam jurnal yang berjudul “AUKUS Peluang dan Kendala bagi Indonesia” yang ditulis oleh Lukman Yudho Prakoso tahun 2021 membahas tentang peluang dan kendala bagi Indonesia pasca diratifikasinya pakta pertahanan AUKUS (Prakoso 2021). Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan berbasis pada literatur yang sudah ada. Jurnal ini membahas peranan sentral ASEAN dalam keamanan regional sangat penting mengingat bahwa hukum merupakan salah satu indikasi rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Jurnal ini merangkum beberapa tanggapan dari negara-negara anggota ASEAN seperti ada negara-negara yang mendukung, *abstain* dan menolak. Argumentasi bahwa sentralitas ASEAN menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keutuhan ASEAN dalam penelitian ini. Sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal ini juga mengatakan bahwa pentingnya negara-negara ASEAN untuk mengeluarkan konsensus untuk menanggapi AUKUS ini secara kolektif.

Selain itu Jurnal ini juga membahas dampak dan strategi yang harus diambil oleh Indonesia dalam menghadapi AUKUS. Dampak yang dialami Indonesia yaitu kemungkinan terjadinya eskalasi tensi rivalitas Tiongkok-AS di wilayah Laut Cina Selatan. Strategi yang Indonesia bisa lakukan dalam penelitian ini ditekankan dalam peranan politik luar negeri bebas dan aktif. Sama dengan jurnal sebelumnya, jurnal ini juga menekankan peranan ASEAN yang krusial dan peranan Indonesia bisa diimplementasikan selaras dengan gagasan filosofis polindonya yaitu bebas

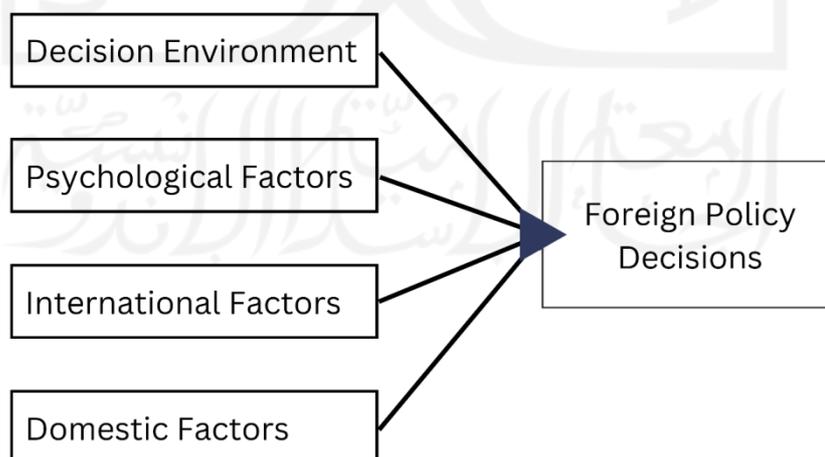
dan aktif yang mirip dengan penelitian yang akan ditulis kali ini. Namun terdapat perbedaan mendasar yaitu, penelitian ini hanya menulis argumentasi tersebut secara general dan normatif tanpa adanya bukti konkrit dan landasan teknis.

1.6 Kerangka Pemikiran

Foreign Policy Decision-Makers (FPDM)

Alex Mintz dan Karl DeRouen menjelaskan secara kompleks FPDM pada bukunya yang berjudul *Understanding Foreign Policy Decision Making* yang terbit pada tahun 2010. Mereka mendefinisikan FPDM sebagai pilihan atau keputusan yang diambil oleh suatu individu, grup atau koalisi yang mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam level internasional. Terdapat empat determinan dalam pengambilan kebijakan luar negeri diantaranya lingkungan pengambilan keputusan, faktor psikologi, faktor internasional dan faktor domestik (Mintz and DeRouen 2010).

Gambar 1 Peta Teori *Foreign Policy Decision Making*



Sumber: Mintz & Derouen (2010)

1. Lingkungan Pengambilan Keputusan (Decision Environment)

Pada lingkungan pengambilan keputusan tersusun menjadi dua bagian yang berhubungan yaitu tingkat analisis (*level of analysis*) dan tipe keputusan. Pada tingkat analisis sendiri terdiri tiga bentuk yaitu individual, grup atau koalisi. Penulis akan menempatkan **grup** sebagai tingkat analisis tulisan kali ini. Grup sendiri dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan oleh kabinet, parlemen, komite dan lainnya. Sehingga tipe keputusan yang muncul adalah keputusan grup (*group decision*) (ibid, 19-20). Untuk itu tulisan ini akan menitik beratkan pada Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemerintahan Indonesia berjalan. Penitikberatan pada kabinet ini dikarenakan pada asumsi awal terhadap kapabilitas aktor di dalamnya yang meliputi Presiden Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan.

2. Faktor Psikologi (Psychological Factors)

Dalam faktor psikologi ini terdapat beberapa poin variabel yang tersedia seperti, konsistensi kognitif, situasi yang timbul, perasaan, *images*, nilai-nilai sistemik dan skema, analogi dan pembelajaran, kepribadian pemimpin dan gaya kepemimpinan. Untuk memberikan analisis pembedah yang tajam penulis akan mengambil salah satu variabel penentu yaitu konsistensi kognitif. **Konsistensi kognitif** adalah fenomena yang muncul para pengambil keputusan ketika meremehkan suatu informasi yang tidak pasti dengan nilai-nilai atau falsafah yang dipercayai serta citra yang sudah melekat sebelumnya. Kondisi ini membuat para pengambil keputusan sudah mengekspektasikan kebijakan yang akan diambil berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami sebelumnya (ibid).

Konsistensi kognitif ini dapat teraplikasikan pada rentetan kebijakan Indonesia yang menyongsong nilai bebas-aktif. Presiden Joko Widodo sendiri menggunakan falsafah ini pada periode kepresidenannya sekarang (2019-2024) dan sebelumnya (2014-2015). Dengan ini dapat dikatakan bahwa falsafah dan *framing* bebas-aktif telah menjadi konsisten sebagai dasar pemerintahan Indonesia dalam kebijakan luar negerinya.

3. Faktor Internasional (International Factors)

Begitupun pada bagian faktor internasional juga terdapat beberapa determinan penentu FPDM menurut Mintz. Diantaranya adalah pencegahan, kompetisi persenjataan, kejutan strategis, aliansi dan bentuk rezim rival. Dari beberapa faktor determinan ini penulis akan memfokuskan pada determinan **pencegahan dan perlombaan senjata**. Kedua variabel penentu ini didasari pada pemikiran realis yaitu kondisi anarki menciptakan negara untuk bertanggung jawab atas keamanannya.

Untuk itu, kehadiran negara dalam hal ini seperti membangun dan mengembangkan sistem keamanan dan militernya agar negara lain tidak menginvasinya.. Tindakan ini bisa membawa situasi internasional pada dilema keamanan (*security dilemma*). Dengan beriringnya suatu negara mengembangkan keamanannya, maka negara lain melihat itu sebagai ancaman sehingga terciptalah kompetisi persenjataan. Kompetisi persenjataan pada dasarnya adalah perlombaan diantara negara-negara dalam membangun dan mengembangkan kemampuan militernya.

Pada area Asia-Pasifik Tiongkok menjadi negara yang paling tinggi pada tahun 2020 menghabiskan dana untuk militernya yaitu sekitar 253 miliar dollar. Sedangkan Australia sebagai anggota AUKUS sendiri menghabiskan 27 miliar dollar dalam pengembangan militernya hampir 10 kali lipat berbeda jauh dengan Tiongkok. Sehingga keberadaan AUKUS di Asia-Pasifik menjadi jelas sebagai penantang perkembangan militer Tiongkok. Amerika Serikat sendiri berada di posisi puncak sebagai negara terbesar dalam mengeluarkan dana terhadap pengembangan militernya dengan 778 miliar dollar (SIPRI 2021).

4. Faktor Domestik (Domestic Factors)

Mintz dan DeRouen menetapkan beberapa determinan penentu FPDM pada faktor domestik diantaranya kondisi ekonomi (taktik pengalihan), kepentingan ekonomi, opini publik, siklus elektoral dan *Two-Level games*. Pada tulisan ini penulis akan menggunakan **kepentingan ekonomi** sebagai determinan penentu FPDM. Kepentingan ekonomi suatu negara seringkali mempengaruhi negara dalam mengambil kebijakannya. Dalam konteks ini Indonesia mengalami dilema. Pasalnya Indonesia sendiri memiliki serentetan kepentingan ekonomi antara dua blok yang berbeda baik dengan AUKUS maupun Tiongkok.

1.7 Argumen Sementara

Setelah melakukan observasi sementara pada data-data yang ada terkait AUKUS penulis berhipotesis bahwa kebijakan Indonesia yang netral disebabkan oleh beberapa hal. Argumen ini didasari oleh pernyataan Presiden Joko Widodo terkait ASEAN dan Australia dalam upayanya mendorong keamanan kawasan dan

keempat variabel FPDM. Dari segi lingkungan pengambilan keputusan maka dalam hal ini Kabinet Indonesia Maju terlihat bahwa sejauh ini mengeluarkan kebijakan luar negeri yang melibatkan atau berkerjasama dengan dua kubu yang berseteru yaitu AS dan Tiongkok. Kondisi ini juga didukung dengan konsistensi kognitif Indonesia yang didasari oleh falsafah politik luar negerinya bebas-aktif yang diadaptasikan pada kebijakan luar negeri Indonesia oleh Kabinet Indonesia Maju. Pada faktor Internasional terlihat bahwa kedua kubu ini sedang berlomba dalam menunjukkan kekuatan militernya di Indo-Pasifik yang menjadi letak geografis Indonesia. Sehingga langkah Indonesia yang paling tepat adalah netral dengan pencegahan kedua kubu agar tidak melakukan agresi ke negaranya atau tidak menunjukkan kecenderungan pada salah satu kubu. Pencegahan ini juga mempertimbangkan adanya kepentingan ekonomi Indonesia dengan kedua kubu tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam menganalisis sikap kebijakan luar negeri Indonesia terhadap traktat perhatian AUKUS 2021-2022 menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Abdussamad penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki pusat analisis pada pengamatan deduktif dan induktif. Pengamatan ini juga turut disertai dengan menganalisis dinamika fenomena yang diteliti dengan memakai logika. Ia juga menambahkan bahwa pendekatan kualitatif melihat suatu masalah dengan fokus utama memahami secara mendalam terhadap

suatu isu yang diteliti bukan untuk menggeneralisasi objek penelitian tersebut (Abdussamad 2022).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki lokus subjek pada negara Indonesia yang setiap kebijakannya direpresentasikan oleh pemerintah periode berjalan. Untuk itu penelitian ini secara langsung meletakkan subjek pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Studi Literatur (Kepustakaan) sebagai metode pengumpulan data. Studi literatur sendiri adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut yang bersumber dari perpustakaan atau internet (Sari and Asmendri 2020).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian pertama adalah mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian. Langkah berikutnya adalah menyeleksi data tersebut berdasarkan keterkaitan dengan isu sikap kebijakan luar negeri Indonesia terhadap traktat pertahanan AUKUS 2021-2022. Proses terakhir menganalisa data yang sudah terkumpul dan meng korelasikan dengan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab II

Konteks AUKUS terhadap Politik Internasional di Kawasan Indo-Pasifik

Pada bab I sebelumnya dijelaskan terkait latar belakang kepenulisan hingga teori dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Bab II penulis akan menjabarkan pendahuluan isu AUKUS yang terbagi menjadi tiga sub-bab. Pertama adalah dinamika AUKUS dimana penulis menjelaskan terkait dinamika pembentukan traktat kerjasama pertahanan AUKUS. Kemudian di sub-bab kedua secara garis besar akan membahas tujuan traktat AUKUS yang dimana akan dibagi menjadi tiga pembahasan berdasarkan negara anggotanya yaitu AS, BR dan Australia. Pembahasan ini ditujukan untuk melihat kajian strategis setiap negara dibalik adanya AUKUS. Dari kepentingan-kepentingan ini penulis lalu berangkat dalam pembahasan sub-bab selanjutnya yaitu dampak kerjasama AUKUS.

Dalam pembahasan sub-bab ketiga ini peneliti ingin menjabarkan terkait dengan kebijakan negara-negara yang secara langsung akan bersinggungan dengan keberadaan AUKUS di Indo-Pasifik. Penulis dalam hal ini akan membahas negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Negara-negara ini dipilih terkait Penulis juga akan melihat apakah AUKUS dapat beririsan dengan kepentingan negara-negara lain seperti Tiongkok dengan klaim *nine-dash line*-nya. hubungannya dengan Indonesia dan kondisi geografisnya yang terletak di Indo-Pasifik. Sederet pembahasan ini ditujukan menjadi pengenalan isu dan dilema Indonesia terkait kebijakan luar negerinya terhadap AUKUS.

2.1. Dinamika kerjasama AUKUS

Dinamika AUKUS tidak terlepas dari dilema yang dihadapi Australia terkait keamanan kedaulatannya. Secara geografis teritori Australia menyebabkan terputusnya hubungan Australia atau diskoneksi dengan para sekutu baratnya. Australia memiliki luas teritori sebesar 7.692 miliar kilometer persegi dengan jarak garis pantai sepanjang 36,735 Km persegi. Dianugerahi dengan sumber daya alam yang banyak, Australia memiliki PDB sebesar 2 triliun dollar menjadi negara dengan ekonomi terbesar di kawasannya. Namun disisi lain Australia kekurangan tenaga kerja dengan hanya memiliki total 25.7 miliar penduduk yang kebanyakan tinggal di garis pantai. Tercatat kemampuan militer Australia pada tahun 2016 disokong oleh 58,000 personil dengan 19,500 personil cadangan dan 17,900 warga sipil. Sebagai negara maju, Australia memiliki industri pertahanan yang kecil jika dibandingkan dengan Jepang atau Korea Selatan. Hal ini menjadikan konteks ketakutan terbesar Australia terkait keamanan kedaulatan negaranya (Adamy 2022).

Pasca kekalahan AS dalam perang Vietnam pada kurun waktu 1970 hingga 1980-an membuat orientasi keamanan Australia berubah. Normalisasi pengaruh Tiongkok pasca perang tersebut hingga perkembangan kawasan yang pesat menyebabkan Australia hanya bergantung pada kekuatan negaranya sendiri. Pada *Defence White Paper*-nya ditahun 1987, Australia mengemembangkan kemampuan *Australian Defence Force* (ADF) untuk mampu menjaga kedaulatan Australia tanpa bantuan negara lain. Hingga menginjak tahun 2010 ketika Tiongkok mulai mengemembangkan kekuatannya dengan pesat dan AS mulai tertarik dengan kawasan Indo-Pasifik membuat Australia harus menentukan kebijakannya dengan penuh

perhatian lebih. Pada tahun 2020 kebijakan pertahanan Australia menunjukkan aksi pencegahan yang dilakukan dengan kapabilitas militernya terhadap aksi Tiongkok yang mengacaukan tatanan peraturan internasional di kawasan Indo-Pasifik (ibid).

Dalam kajian strategi pertahanan Australia tahun 2020 secara tersirat menyatakan beberapa wilayah yang krusial. Diantara wilayah ini adalah Timur Laut Samudera Hindia, Asia Tenggara hingga Papua Nugini dan Barat Daya Samudra Pasifik yang perlu diperhatikan oleh ADF untuk mencegah dan beroperasi ketika pemerintahan Australia memerintahkan. Australia menyadari bahwa ASEAN penting bagi kawasan Indo-Pasifik. Intensi Australia untuk meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga jelas untuk dapat mencegah ancaman kedaulatannya. Namun pada tahun 2020 kerangka kerjasama ASEAN dan Australia dalam *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) belum menunjukkan intensi dan komitmen yang jelas bagi Australia. Lebih jauh, Australia merasa tidak dapat bergerak leluasa dalam hal menyampaikan kepentingannya mempertimbangkan bahwa peranan Australia dalam kawasan ini lebih cenderung kebanyakan sebagai pengamat dan partner dialog (ibid).

Diskoneksi yang cukup terasa bagi Australia membuat AUKUS merupakan momentum berbenah dalam hal strategi keamanan negaranya. AUKUS merupakan pilihan logis selain ASEAN mengingat AS dan BR merupakan aliansi lamanya. AUKUS sendiri menurut Australia menjadikan yang pertama komitmen AS untuk menyeimbangi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik setelah gagalnya *pivoting* pada era Presiden Obama. Yang kedua, AUKUS menjadi momentum baliknya pakta pertahanan UKUSA yang pernah dijalankan oleh ketiga negara ini pada tahun 1947. Setelah melewati beberapa traktat pertahanan seperti ANZUS dan *Five Eyes*

Arrangement, AUKUS merupakan traktat pertahanan yang paling mendekati UKUSA. Selayaknya UKUSA, AUKUS akan membantu Australia dalam mengembangkan kemampuan militer, intelijen dan teknologi untuk mencegah penetrasi ancaman kekuatan militer dari negara lain (ibid).

Secara resmi pada tanggal 15 September 2021 Australia, BR dan US membentuk AUKUS membuat koalisi kekuatan baru di Indo-Pasifik. AUKUS yang menyongsong tujuan untuk menahan laju Tiongkok membentuk kekuatan baru di kawasan. Jika dihitung dengan parameter pagu militer negara di tahun 2020, tiga negara AUKUS dapat berjumlah 865 miliar dolar dan Tiongkok 253 miliar dolar. Pagu militer yang fantastis jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mengeluarkan pagu militer sebesar 9 miliar dolar ditahun yang sama (SIPRI 2021). Kondisi yang dilematis bagi Indonesia ditambah absennya kerjasama dibidang pertahanan ala NATO menjadikan perhatian lebih terhadap urgensi kebijakannya terkait traktat AUKUS. Secara diplomasi hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut dapat dikatakan baik dan cukup lama. Misalkan dengan Australia, AS dan BR Indonesia sudah berhubungan baik mulai tahun 1949 atau 74 tahun lamanya. Sedangkan hubungan diplomasi pertama kali Tiongkok diawali pada tahun 1950 atau berbeda satu tahun dengan anggota AUKUS selama 73 tahun lamanya.

Secara geografis Indonesia yang memiliki luas wilayah 5.193.250 kilometer persegi dengan garis bentang sejauh 6.400 akan berhadapan langsung dengan Australia di bagian selatan dengan jarak 3.457 kilometer serta dibagian utara Tiongkok 4.198 kilometer (Kompas Cyber Media 2020). Wilayah Indonesia ini juga meliputi beberapa wilayah perairan internasional sesuai ketentuan *United*

Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982 seperti perairan Samudera Hindia - Selat Sunda Laut - Laut Tiongkok Selatan, Selat Makassar - Selat Lombok dan Samudra Hindia - Laut Banda - Laut Maluku - Samudera Pasifik (Perdana, Ramasandi, and Setiawan 2021). Kondisi ini membuat perairan Indonesia dapat diakses dari belahan bumi manapun. Dalam konteks AUKUS dan Tiongkok maka Australia dapat berlalu-lalang melalui ketiga corong tersebut sedangkan Tiongkok melalui LNU dan Selat Makasar. Sehingga corong-corong ini dapat menjadi titik lemah kedaulatan tertitorial Indonesia.

Sederet konteks ini membuat Indonesia perlu menekankan perhatian lebih terhadap kebijakan luar negerinya dalam memposisikan diri terhadap traktat AUKUS. Pasalnya baik AUKUS maupun Tiongkok berhubungan baik dengan Indonesia dan terdapat sederet kepentingan Indonesia di dalamnya. Tidak hanya itu peranan polugri bebas aktif akan berperan sangat penting sebagai pertimbangan kekuatan militer, letak geografis dan kepentingan politik Indonesia. Untuk itu dalam sub-bab selanjutnya akan dibahas terkait konteks AUKUS di luar perspektif Indonesia. Pembahasan terkait kebijakan bebas aktif Indonesia akan dibahas selanjutnya pada bab tiga.

2.2. Tujuan traktat pertahanan AUKUS

AUKUS merupakan traktat pertahanan yang disepakati oleh tiga negara yaitu Amerika Serikat (US), Australia dan Britania Raya (BR) pada tanggal 15 september 2021 silam. Pada hari Kamis Perdana Menteri Australia Scott Morris pada saat itu dan mantan perdana menteri Britania Raya Boris Johnson serta presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan virtual sekaligus

meresmikan kerjasama pertahanan ini yang dinamakan berdasarkan keanggotaannya (AUKUS) (The White House 2021b). AUKUS merupakan wujud dari keinginan tiga negara untuk memperkuat diplomasi, keamanan dan kerjasama-kerjasama pertahanan di Indo-Pasifik Disamping itu, AUKUS berfungsi sebagai penguat kerjasama dengan partner (anggota) untuk menghadapi tantangan di abad ke-21. Kehadiran AUKUS ini dirasa menjadi format baru perjanjian keamanan trilateral yang memperkuat kontinuitas hubungan diplomasi bilateral yang sudah terjalin oleh ketiga negara tersebut .

Dibalik pembentukan traktat pertahanan AUKUS terdapat segelintir strategi dibaliknya. Secara mendasar kerjasama ini berencana untuk memberikan delapan kapal selam bertenaga nuklir kepada Canberra berdasarkan inovasi yang telah dilakukan AS untuk penggerak atau mesin kapal selam bertenaga nuklir yang juga sebelumnya telah bagikan terlebih dulu ke sekutu lamanya, BR. Tindakan ini akan melibatkan keahlian dua negara yaitu AS dan BR dalam satu proyek bersama yang bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas, kesamaan dan keuntungan bersama (Minister for Foreign Affairs 2021).

Lebih dalam terdapat tiga garis besar strategi di balik pembentukan AUKUS. Pertama bagi AS dan BR wilayah Indo-Pasifik penting, untuk itu keamanan di wilayah tersebut perlu ditingkatkan. Kemudian untuk Australia traktat ini mendukung prioritas kebutuhan operasional militer dan kepentingan perluasan hegemoni. Terakhir, kehadiran traktat pertahanan ini merupakan representasi kekuatan aliansi lama yang dibentuk atas nilai yang sama yaitu persaudaraan anglofon atau negara yang berbahasa Inggris (Jones 2021).

2.2.1. Amerika Serikat (AS)

Gerak-gerak AS terhadap keinginannya untuk terlibat dalam peranya di Indo-Pasifik terlihat jelas ketika menelaah hengkangnya militer AS di Afghanistan. 31 Agustus 2021 menjadi waktu bersejarah berakhirnya perang lama AS di Afghanistan. Perang yang terinisiasi atas “*war on terror*” ini dimulai pada tahun 2001 memakan 20 tahun lamanya dan biaya yang sangat besar untuk AS (The White House 2021a). Penarikan diri militer AS di Afghanistan ini merupakan keputusan yang tentu saja didasari oleh kepentingan nasionalnya. Presiden Joe Biden sendiri menyatakan bahwa AS tidak memiliki kepentingan keamanan nasional lagi di Afghanistan. Biden juga menyatakan bahwa AS berencana untuk *shifting* operasi militer baru dengan target negara baru yaitu Tiongkok (ibid). Menjadi menarik mengingat 16 hari setelah pernyataan resmi Presiden Biden, AUKUS terbentuk tepatnya pada tanggal 15 September. Ini menjadikan salah satu intensi AS jelas terhadap pembentukan AUKUS. Kepentingan AS dalam kebijakan luar negerinya tergambar secara jelas dalam slogan Joe Biden, “*America is back*”.

Slogan ini kemudian diwujudkan dalam menguatkan kerjasama internasional untuk membangun hubungan yang mutual seperti munculnya traktat pertahanan AUKUS. AUKUS sendiri merupakan rencana jangka panjang AS dalam mengganti fokus utama strategi keamanannya. AUKUS sendiri memberikan dua makna terhadap kebijakan keamanan AS namun pada dasarnya mengupayakan penekanan terhadap perkembangan atau perluasan pengaruh Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik. Untuk itu yang pertama ditekankan oleh Presiden Joe Biden dalam traktat pertahanan ini adalah melakukan pendekatan *ruled-based* untuk menciptakan *Balance of Power* di regional Indo-Pasifik (Novita 2022). Kemudian

dalam Hal ini AS juga mengerahkan seluruh kemampuan dan teknologi militernya dalam menghadapi Tiongkok. AS juga dalam traktat ini membawa aliansi-aliansi lamanya yang tergabung dalam AUKUS untuk menghadapi Tiongkok dan aliansinya. Kemampuan dan teknologi militer AS serta kehadiran aliansi lamanya yaitu Australia memberikan keuntungan yang signifikan jika ingin mendominasi Tiongkok (ibid).

Serangkaian ketertarikan AS terhadap wilayah Indo-Pasifik ini tercantum dalam dokumen “*Indo-Pacific Strategy of the United States*” yang dirilis pada Februari 2022. Dalam dokumen ini AS menunjukkan keinginannya untuk mendukung peningkatan kemampuan pertahanan Taiwan dalam menjaga selatnya dan juga dapat menjamin masa depannya sesuai dengan keinginan masyarakat aiwan. Kehadiran AS dalam wilayah Indo-Pasifik ini juga tidak terlepas dari ancaman wacana pengembangan rudal nuklir Korea Utara. Hal ini membuat terjadinya peningkatan perhatian keamanan di semenanjung Korea seperti Korea Selatan dan Jepang yang keduanya merupakan aliansi AS. Sehingga AS berupaya mewujudkan kestabilan semenanjung Korea dengan upaya melakukan dialog dengan Korea Utara untuk denuklirisasi dan meningkatkan narasi-narasi hak asasi manusia (The White House 2022a).

Serangkaian kepentingan AS di Indo-Pasifik ini merupakan bentuk rencana jangka panjang AS dalam memperbesar pengaruhnya. Secara diplomatis tujuan besarnya adalah agar wilayah Indo-Pasifik tetap dapat diakses dan terbuka selebar-lebarnya terutama terhadap kondisi kelautan dan udara wilayah tersebut agar tetap berjalan berdasarkan konvensi internasional yang sudah ada. AUKUS merupakan salah satu bentuk implementasi dari keinginan tersebut agar AS dapat menjaga

keamanan maritim terutama pada Laut Natuna Utara dan Laut Tiongkok Timur. Dari segi ekonomi AS sendiri secara resmi telah membentuk *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) untuk menciptakan pasar Indo-Pasifik yang mudah diakses dan terbuka (ibid). Washington menambahkan bahwa kepentingan di wilayah Indo-Pasifik menjadi semakin jelas namun disatu sisi semakin sulit untuk didekati. Minimnya pilihan pendekatan untuk menunjukkan eksistensi AS disana membuat Washington harus menempuh jalan kerjasama antar sektor agar bisa menunjukkan kepemimpinannya di wilayah Indo-Pasifik (ibid).

2.2.2. Britania Raya (BR)

Posisi Britania Raya dalam AUKUS sendiri bisa dinyatakan dapat mengakomodir tujuan jangka panjang BR dalam konstelasi politik internasional. Pasca keluarnya BR dari salah satu organisasi rezim regional tersebar Uni Eropa atau yang dikenal sebagai fenomena “*Brexit*” menjadikan BR mempunyai tujuan baru yang jauh kedepan. Mimpi BR ini diinisiasikan oleh perdana menteri pada saat itu yaitu Boris Johnson dengan slogan “*Global Britain*”. *Global Britain* dimaksudkan secara harfiah sebagai peran dan pengaruh Britania Raya yang mendunia. Boris Johnson sendiri telah mengatur visi dari mimpi ini agar dapat terwujud di tahun 2030 atau satu dekade setelahnya (Cabinet Office 2021).

Beberapa yang menyebutkan bahwa traktat pertahanan AUKUS ini diduga bermula dari keinginan kepala angkatan laut Australia (*Royal Australian Army*) untuk bekerjasama dengan aliansi terkuatnya BR. Ini didasari pada hubungan diplomatis yang secara historis Australia banyak bergantung pada keahlian angkatan laut yang telah dimiliki oleh BR. Salah satunya terkait dengan

kemampuan pengendalian dan armada kapal selam yang bahkan beberapa perwiranya sendiri berasal dari BR (Camroux 2021). Dengan kondisi ini BR secara tidak langsung dapat melakukan penetrasi visi *Global Britain*. BR yang sudah memiliki armada kapal selam bertenaga nuklir akan memiliki pangkalan militer tetap di Australia dengan adanya kerjasama ini. Sehingga membuat jarak jangkauan dan kehadiran armada-armada kapal selam bertenaga nuklir BR di wilayah Indo-Pasifik seperti *UK Carrier Strike Group* yang memuat kapal induk HMS Queen Elizabeth lebih lama. Dengan ini membuat kembalinya peranan besar BR dalam perairan internasional pasca penarikan dirinya dari program “*east of sues*” (ibid).

Ini menjadi bukti penting dari realisasi konsep operasi militer BR yang baru dalam *Integrated Operating Concept* (IOPC). Dalam melaksanakan program inti pertahanan IOPC terdapat dua faktor penting bagi BR yaitu melibatkan aliansi di dalamnya dan membatasi rivalitas dengan cara mencegah konfrontasi atau pertempuran terbuka (Kaushal 2021). Terlebih lagi, BR menekankan bahwa pentingnya mengkondisikan penggunaan militer guna membuka kesempatan untuk membentuk dan menjalin kerjasama dengan negara lain dalam meningkatkan perekonomian atau industri nasional. Sehingga traktat AUKUS menjadi medium realisasi tujuan-tujuan BR. Dalam hal meningkatkan perekonomian dan industri nasionalnya, BR dapat mengambil peran dalam membangun motor atau mesin penggerak bertenaga nuklir yang nantinya akan digunakan oleh Australia dalam kapal selamnya. Kemungkinan besar BR akan mengadaptasi reaktor nuklir Rolls Royce yang menjadi rotor penggerak kapal selam Astute dan Vanguard-Class dalam transfer teknologinya ke Australia nanti. Tidak hanya itu, BR juga di anggang-ancang akan menghibahkan teknologi jet pompa penggerak senyap yang digunak

dalam kapal selamnya Astute-Class (ibid). Jika hal ini terjadi maka BR dapat menjamin terciptanya lapangan kerja baru dalam hal produksi bersama rotor penggerak nuklir.

2.2.3. Australia (AU)

Setelah sekian lama secara diplomatis Australia berada di sisi AS, akhirnya Australia mendapatkan imbalan yang setara. Australia menjadi negara yang menyatakan sikap untuk membela setiap keputusan perang yang diambil oleh AS sejak perang dunia pertama. Adanya traktat AUKUS ini sangat membantu Australia dalam mengembangkan kemampuan angkatan lautnya. Hadiah ini berupa transfer teknologi merupakan kapal selam bertenaga nuklir yang sebelumnya hanya dimiliki oleh BR dan AS. Program kapal selam bertenaga nuklir ini tercantum dalam *Naval Nuclear Propulsion Program* (NNPP). Dengan ini menjadikan Australia sebagai negara ketiga yang akan memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Wacananya Australia akan menggantikan kapal selam *collins-class* yang sudah ketinggalan jaman dengan kapal selam serang bertenaga nuklir. Dengan adanya traktat ini membuat Australia menjadi negara ketiga yang dipersenjatai dengan nuklir (*nuclear weapon states*) yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir sejak tahun 1958. Program ini akan dijalankan dalam kurun waktu 18 bulan pasca peresmian AUKUS (Gower and Ogilvie-White 2021).

Tentu saja transfer teknologi ini memiliki banyak kepentingan di belakangnya. Salah satunya yaitu secara geografis Australia yang berada di wilayah Indo-Pasifik secara langsung berhadapan dengan Tiongkok sehingga AS tertarik untuk meluaskan pengaruhnya disana. Dengan menguatnya kemampuan atau

kapabilitas militer Australia diharapkan dapat menjadi representasi AS dalam mencapai *Balance of Power* dengan Tiongkok. Tidak hanya itu AS dalam traktat ini juga akan menjalin kerjasama yang berkaitan dengan teknologi dan mineral. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan Australia sebagai negara yang bisa mengarahkan wilayah Indo-Pasifik untuk mengikuti konvensi internasional yang sudah ada (Novita 2022).

Adapun beberapa hal yang akan diterima oleh Australia dalam kerjasama ini adalah kapal selam bertenaga nuklir (*Attack-Class Submarine*), rudal jelajah Tomahawk, dan beberapa tipe rudal lainnya. Australia juga akan mendapatkan dana segar sejumlah 1 miliar dolar dalam membangun usaha manufaktur senjata baru di negaranya. Kemampuan untuk membuat senjata baru ini dan juga adanya tambahan fitur untuk kapal selam Collins-class akan menambah kemampuan Australia dalam menantang dan merespon potensi-potensi yang mengganggu keamanannya (Defence Ministers 2021). Kehadiran investasi dana segar tersebut tentu saja memberikan efek ekonomi bagi masyarakat Australia.

Pemerintah Australia sendiri akan berupaya menggunakan kemampuan domestiknya dalam membangun kapal selam dan manufaktur senjata tersebut seperti salah satunya berpartner dengan ASC perusahaan pembuat kapal selam Australia untuk mengelola dan merealisasikan manufaktur dan keahlian pembuat kapal selam baru nanti. Pembangunan manufaktur baru ini direncanakan akan dibangun di bagian Selatan Australia dengan memaksimalkan tenaga kerja Australia yang sudah dilatih sebelumnya oleh ASC (ibid). Melalui laman resmi menteri pertahanan Australia pada tanggal 16 September 2021 menyatakan bahwa program ini dan opsi-opsi lain terkait trakt AUKUS akan dilaksanakan dan

dikonsultasikan selama 18 kedepan. Terkait dengan penggunaan nuklir Australia menyatakan niatnya untuk tidak memanfaatkan nuklir sebagai senjata perang yang telah diatur dalam NPT (ibid).

Australia merupakan negara utama menjadi fokus dalam traktat pertahanan AUKUS ini. Sehingga tujuan-tujuan utama yang berada di dalam traktat ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan militer Australia. Dalam *Fact Sheet* yang dirilis oleh *The White House* pada tanggal 5 April 2022. Penyerahan transfer teknologi berupa kapal selam bertenaga nuklir telah disetujui dalam *The Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement* (ENNIPIA) yang telah diratifikasi oleh ketiga negara pada tanggal 8 Februari 2022 (The White House 2022b). Tidak hanya itu, dalam *Fact Sheet* ini juga menunjukkan *update* dari program ini berupa peresmian lokasi yang menjadi pangkalan kapal selam nuklir baru di wilayah laut timur Australia. Pangkalan kapal selam baru ini diresmikan oleh mantan PM Australia, Morrison pada tanggal 7 Maret 2022. Dalam pembangunan pangkalan baru ini Australia juga menambah lahan baru bersebelahan dengan galangan kapal di Utara Osborne. Secara proaktif ketiga negara ini melaporkan aktivitasnya terkait penggunaan nuklir dengan *International Atomic Energy Agency*. IAEA sebagai organisasi internasional yang mengawasi penggunaan nuklir melalui Direktur Jendralnya Rafael Mariano Grossi, telah menyatakan bahwa ketiga negara ini telah berkomitmen dalam memastikan tidak adanya penyelewengan terhadap NPT dan menaruh standar keamanan yang tinggi dalam memanfaatkan nuklir (ibid).

2.3. AUKUS dan pengaruhnya terhadap geopolitik Indo-Pasifik

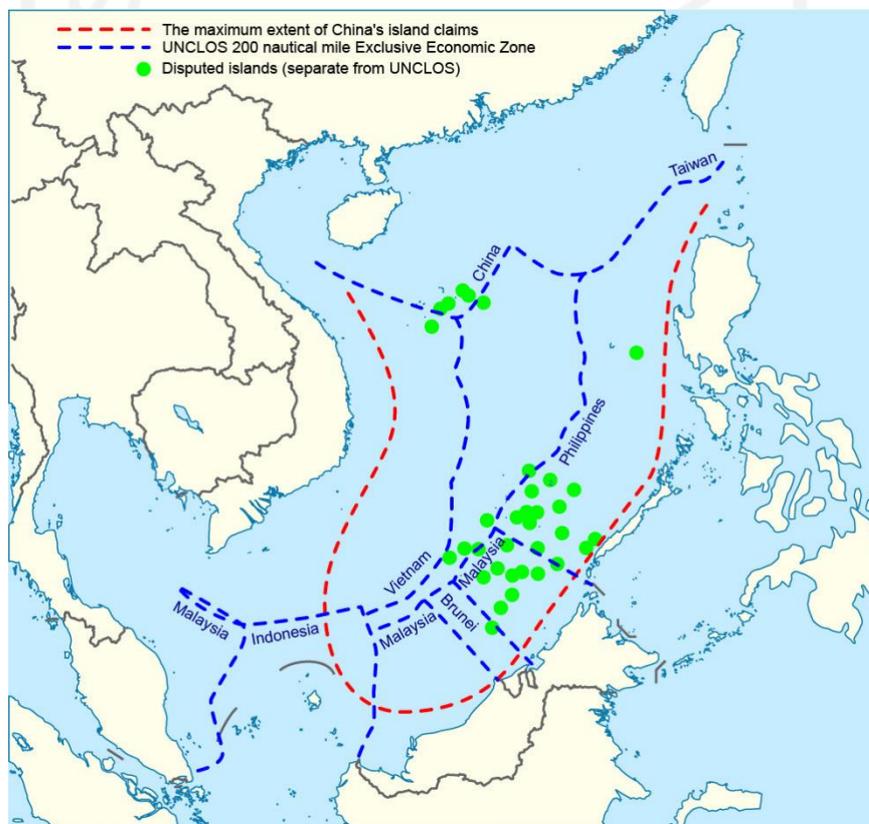
Keberadaan traktat pertahanan AUKUS di wilayah Indo-Pasifik menyebabkan gejolak keamanan regional. Seperti yang telah tercantum sebelumnya bahwa secara garis besar strategi dibalik adanya AUKUS adalah menempatkan hegemoni di Indo-Pasifik. Sehingga mau secara tidak langsung berdampak dalam dinamika regional terutama mengingat tensi perebutan hegemoni dunia antara AS dan Tiongkok. Secara jelas AUKUS juga berniat untuk hadir sebagai penantang langsung dari perkembangan pesat militer Tiongkok di Indo-Pasifik. Kondisi ini menciptakan situasi dilematis geopolitik negara-negara Indo-Pasifik. Untuk itu pada bagian ini penulis akan menganalisis dampak geopolitik AUKUS yang berkenaan dengan judul. Dalam hal ini penulis akan membedah Tiongkok sebagai negara yang secara langsung terkena dampak traktat pertahanan ini dan ASEAN yang secara tidak langsung terdampak.

2.3.1. Tiongkok

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan AUKUS salah satunya didasari pada absennya tandingan kapabilitas militer Tiongkok di Indo-Pasifik. Hal ini didasari pada tindakan Tiongkok dalam ambisinya untuk mengklaim dan mengontrol daerah perairan internasional toleh zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain dan pulau-pulau yang seharusnya tidak dimilikinya. Berbagai cara dilakukan Tiongkok dalam hal ini termasuk membangun pangkalan militernya di pulau-pulau tersebut dan terdapat aktivitas-aktivitas militer rahasia menjadi ancaman bagi AUKUS. Secara garis besar Tiongkok melakukan pemotongan akses wilayah perairan secara besar untuk dapat mengontrol secara efektif wilayah

perairan tersebut. Sengketa wilayah ini terletak di perairan Laut Natuna Utara (LNU) yang juga melibatkan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Sehingga keberadaan AUKUS di wilayah Indo-Pasifik tentu saja menjadi ancaman bagi strategi keamanan Tiongkok (Gower and Ogilvie-White 2021)

Gambar 2. Peta Wilayah Klaim-Klaim Negara di LNU



Sumber: Gower and Ogilvie-White (2021)

Tiongkok sendiri tidak tinggal diam. Seminggu setelah resminya AUKUS, Beijing langsung menanggapi hal ini dengan kritis. Tiongkok menuding sikap AS dan aliansinya yang membangkitkan mentalitas-mentalitas tensi perang dingin. Global Times media nasional Tiongkok sering kali menggambarkan AUKUS

sebagai hal yang ceroboh dan merugikan diri sendiri. Dalam responya, Tiongkok selalu menjadi oposan dengan mengeluarkan statemen atau kebijakan baru dalam menanggapi AUKUS. Salah satu bentuk statemen ini dinyatakan oleh Menlu Tiongkok dengan menekankan bahwa negara-negara yang tidak berkecimpung di dalamnya harus meninggalkan cara berpikir *zero-sum* ala perang dingin (Swanström and Nagy 2021).

Ia juga menyatakan bahwa dalam menanggapi AUKUS negara-negara tersebut tidak boleh menggunakan konsep geopolitik yang sempit. Untuk itu Menlu Tiongkok mengatakan solusi terbaik adalah dengan meningkatkan kerjasama di regional Indo-Pasifik. Beijing juga menggaris bawahi perilaku Australia yang dianggap hipokrit atau standar ganda sebagai negara yang mempromosikan gerakan non-nuklir namun disatu sisi menerima transfer teknologi berupa kapal selam bertenaga nuklir yang diberikan AS. Wang Yi selaku Menlu Tiongkok menekankan kembali terkait kompetisi nuklir yang timbul akibat adanya AUKUS dapat membahayakan NPT (ibid). Ia juga mengingatkan bahwa embel-embel yang dibawa AUKUS berupa mempromosikan kerjasama dan kemakmuran dapat menimbulkan persaingan antar kubu di regional Indo-Pasifik.

Dari segi kebijakan Beijing telah menyiapkan serangkaian program dalam menjaga komitmen kerjasama regional. Salah satunya yaitu pengumuman keinginan Tiongkok untuk bergabung dalam *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) yang disahkan beberapa jam setelah peresmian AUKUS. AS sendiri telah resmi mundur dari CPTPP pada masa kepemimpinan Donald Trump di tahun 2017. Desas-desus intensi Tiongkok untuk bergabung dalam CPTPP ini sudah menjadi rahasia umum, namun presisi waktu

pengumuman resminya menjadi tanda tanya besar. Cara lain yang dilakukan Tiongkok dalam menentang AUKUS adalah dengan menghasut negara lain untuk berada di posisi oposan dari traktat ini. Diantara negara yang merespon tindakan Tiongkok ini adalah Malaysia. Melalui mantan PM-nya Ismail Sabri Yaakob, Menyatakan secara terbuka untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam rangka merespon AUKUS. Kemlu dan media resmi Tiongkok juga telah mengutip keprihatinan yang dinyatakan oleh negara-negara anggota ASEAN dan pemerintah Pakistan terhadap AUKUS yang dirasa dapat mengikis komitmen NPT dalam *Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (SEANWFZ)* dan meningkatkan perlombaan senjata di regional Indo-Pasifik (ibid).

2.3.2. ASEAN

Dalam bagian ini penulis akan menjabarkan beberapa respon negara ASEAN terhadap AUKUS terkecuali Indonesia. Pengecualian ini ditujukan untuk materi yang akan dimuat pada bab selanjutnya. Penjabaran ini akan menjadi salah satu poin penting pembedah pada bab selanjutnya. Pasalnya ASEAN menjadi organisasi regional dimana Indonesia dan negara-negara tetangga terhimpun di dalamnya.

Secara garis besar respon negara-negara anggota ASEAN dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama Malaysia dan Indonesia secara terbuka menunjukkan kecemasannya terhadap resiko penggunaan nuklir dan perlombaan senjata antara negara namun tidak secara langsung menentang keberadaan AUKUS. Thailand, Laos, Brunei, Myanmar dan Kamboja menjadi respon kedua yang cenderung menahan diri untuk secara terbuka merespon AUKUS. Kenihilan tendensi negara-

negara ini terhadap AUKUS secara tidak langsung dapat diartikan menerima kehadiran traktat pertahanan tersebut. Dan yang ketiga negara-negara seperti Filipina, Vietnam dan Singapura telah secara tidak langsung mendukung keberadaan AUKUS di Indo-Pasifik. Dalam ASEAN sendiri tidak ada posisi yang unggul dalam menyikapi dan terbatasnya pernyataan diplomasi bersama terhadap AUKUS. Namun setelah berjalan satu tahun, bisa dikatakan semua negara anggota ASEAN telah secara eksplisit menerima AUKUS (Li 2022).

Pada awal-awal kehadiran AUKUS, Malaysia yang pada saat itu masih dipimpin oleh PM Ismail Sabri Yakob mengatakan bahwa AUKUS dapat menjadi katalisator terhadap perlombaan senjata nuklir di wilayah Indo-Pasifik. Yakob juga mengatakan bahwa Malaysia sebagai anggota ASEAN akan tetap mendorong kedamaian, kebebasan dan netralitas kawasan (Massola 2021). Menlu Malaysia Saifudin Abdullah merilis pernyataan resmi pada tanggal 19 September 2021 terkait AUKUS yang sepenuhnya mendukung pernyataan PM Yakob. IA juga menambahkan bahwa kemunculan AUKUS dapat menjadi pemicu tensi diantara negara-negara *superpower* dan memperkeruh situasi di LNU (Ministry of Foreign Affairs Malaysia 2021). Pernyataan yang serupa juga dinyatakan pada kunjungan Menlu Australia Penny Wong ke Kuala Lumpur 28 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut Australia melalui Menlu Wong menjelaskan visi dan misi AUKUS dari sisi Australia. Malaysia melalui Menlunya, Abdullah menggarisbawahi pentingnya kawasan LNU agar tetap damai sebagai jalur perdagangan Internasional (Puspaningrum 2022).

Thailand sendiri tidak mengeluarkan adanya pernyataan resmi tanggapan mengenai AUKUS. Hal ini juga ditunjukkan oleh Myanmar dan Laos. Ketiga negara

ini tidak ada memberi pernyataan terbuka terkait AUKUS. Diperkirakan absennya pernyataan negara-negara ini dikarenakan tidak memiliki kepentingan lebih terhadap AUKUS hingga masa depan. Respon yang dikeluarkan dipercaya berdasarkan pada keamanan regional atau negara-negara tetangganya terhadap kehadiran dan pengembangan AUKUS. Singapura dan Vietnam menunjukkan respon yang cenderung positif terkait kehadiran AUKUS (Li 2022). Singapura sendiri melalui PM-nya Lee Hsien Loong menunjukkan harapannya terhadap AUKUS dalam keterlibatannya menjaga perdamaian dan stabilitas regional dengan menggunakan pendekatan berlandaskan hukum internasional. Respon PM Lee ini disampaikan setelah menerima telepon dari PM Scott Morrison.

PM Lee juga menyinggung hubungan baik Singapura dengan Australia yang terjalin sudah lama dalam percakapan telepon tersebut (Ministry of Foreign Affairs Singapore 2021) Begitupun dengan Vietnam, dalam hal ini disampaikan oleh menteri luar negerinya Le Thi Thu Hang. Dalam pernyataannya ia menyatakan bahwa semua negara menginginkan tujuan yang sama yaitu perdamaian, kestabilan, kerjasama dan perkembangan di Indo-Pasifik dan seantero dunia. Menlu Hang sendiri menyinggung terkait kapal selam bertenaga nuklir bahwa tujuan pembangunannya haruslah berguna untuk menjaga perdamaian serta membangun sektor-sektor ekonomi dan sosial. Ia juga menyatakan bahwa kapal selam bertenaga nuklir harus dapat menjamin keamanan untuk manusia dan lingkungan hidup. Filipina sendiri mengalami pergolakan internal dalam merespon AUKUS. Ketika awal-awal traktat ini disahkan Filipina pada kala itu masih dipimpin Rodrigo Duterte (Li 2022).

President Duterte sendiri secara tidak langsung berseberangan dengan AUKUS. Pada tanggal 28 September 2021 melalui pernyataan resmi yang disampaikan juru bicaranya Harry Roque menyatakan kekhawatiran Duterte akan peningkatan kompetensi senjata nuklir di kawasan Indo-Pasifik. Seminggu sebelumnya pernyataan sebaiknya keluar dari Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenza dan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. 17 September 2021 Menhan Lorenza melakukan percakapan melalui telepon dengan Menhan Australia, Peter Dutton. Dalam percakapan tersebut Lorenza menyampaikan sambutannya terhadap program pembuatan kapal selam bertenaga nuklir Australia. Sedangkan Menlu Locsin menyambut AUKUS dengan harapan dapat menjamin keamanan dan kestabilan kawasan Indo-Pasifik (Gita-Carlos 2021).

BAB III

Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Traktat Pertahanan

AUKUS 2021-2022 dalam Perspektif *Decision Making*

Pada bab II terdapat penjelasan terkait dinamika, implementasi strategi dan dampak AUKUS. Ketiga pembahasan ini merupakan pendahuluan dalam melihat posisi Indonesia terhadap traktat pertahanan AUKUS. Dalam bagian dinamika pembentukan AUKUS dapat dilihat bahwa proses dibalik terdapat segelintir strategi yang ingin diwujudkan oleh ketiga negara tersebut. Secara garis besar ketiga negara ini merupakan sekutu lama yang bertujuan untuk mempertahankan hegemoni dengan cara menantang kehadiran Tiongkok dalam konstelasi politik internasional. Dengan tujuan ini sudah tergambar jelas fokus keberadaan AUKUS di wilayah Indo-Pasifik. Dengan kehadiran AUKUS ini tentu saja berdampak pada negara-negara di wilayah Indo-Pasifik terutama Tiongkok. Selain Tiongkok negara-negara ASEAN juga mau tidak mau menjadikan realita baru dalam kawasannya. Sehingga pada bagian dampak terdapat penjelasan posisi Tiongkok dan negara-negara ASEAN terkecuali Indonesia dalam merespon keberadaan AUKUS. Perlu digaris bawahi bahwa keberadaan Indonesia dalam memposisikan diri terkait AUKUS berhubungan dengan segelintir kepentingan terutama hubungan antara dua blok AS dalam AUKUS dan Tiongkok sebagai

Respon Indonesia dalam traktat pertahanan AUKUS ini akan dibahas pada bab III sebagaimana premis awal tulisan ini dibuat. Dalam melihat respon atau kebijakan luar negeri Indonesia terhadap AUKUS penulis menggunakan pendekatan *Decision Making* oleh Alex Mintz dan Karl Derouen. Menurut Mintz

dan Derouen terdapat empat faktor besar yang mempengaruhi suatu negara dalam mengambil keputusan yaitu Faktor Lingkungan Pengambilan Keputusan, Faktor Psikologi, Faktor Internasional dan Faktor Domestik. Dalam empat faktor ini terdapat lagi beberapa variabel determinan yang berkaitan maupun tidak faktor-faktor tersebut. Dalam penulisan kali ini penulis hanya mengambil satu atau dua variabel determinan pada setiap faktornya.

Seperti di Faktor Psikologi penulis menggunakan determinan tingkat analisis (*level of analysis*) pada grup dengan itu maka secara tidak langsung akan menempatkan pada tingkat keputusan pada grup (*group decision*). Pada faktor psikologi penulis menggunakan variabel konsistensi kognitif yang secara tidak langsung bersinggungan dengan *belief system* dan *images*. Dalam faktor Internasional penulis menggunakan variabel penangkalan (*deterrence*) dan perlombaan senjata (*arm races*). Dan yang terakhir faktor domestik penulis mengangkat variabel kepentingan ekonomi (*economic interest*) untuk melihat posisi Indonesia dalam merespon keberadaan AUKUS.

Dalam tulisan kali ini penulis akan memodifikasi faktor psikologi dan lingkungan pengambilan keputusan menjadi satu bahasan. Dengan ini variabel tingkat analisis dengan keputusan grup dikombinasikan dengan variabel konsistensi kognitif. Kedua faktor ini digabungkan dalam memudahkan peninjauan terhadap konsistensi kognitif falsafah politik luar negeri (Polugri) Indonesia bebas aktif pada tingkat grup dalam hal ini Kabinet Indonesia Maju. Kemudian pada faktor internasional penulis akan melihat terlebih dahulu variabel determinan perlombaan senjata yang muncul akibat kehadiran AUKUS lalu menelisik penangkalan yang dilakukan Indonesia. Pada faktor terakhir penulis akan menganalisis kepentingan

ekonomi Indonesia terhadap AS dan Tiongkok. AS dipilih oleh penulis di antara dua negara lainya dalam AUKUS didasari pada posisi AS sebagai inisiator AUKUS dan tensi hubungan dengan Tiongkok.

Tabel 1. Variabel Aplikasi Teori FPDM dalam Analisis Kebijakan Indonesia terhadap Traktat Pertahanan AUKUS 2021-2022

Poin Pembahasan	Variabel Determinan	Aplikasi
Faktor lingkungan pengambilan keputusan dan psikologi.	<ul style="list-style-type: none"> ● Tingkat Analisis (<i>Level of Analysis</i>) pada grup ● Kognitif Konsistensi 	<p>→ Penerapan Falsafah politik luar negeri Indonesia: Bebas Aktif pada kabinet Indonesia Maju</p>
Faktor Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlombaan Senjata (<i>Arms Race</i>) ● penangkalan (<i>Deterrence</i>) 	<p>→ AUKUS vs Tiongkok pada kawasan Indo-Pasifik</p> <p>→ Penangkalan Indonesia dengan menggunakan pendekatan militer</p>
Faktor Domestik	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepentingan Ekonomi 	<p>→ Kepentingan ekonomi Indonesia dengan AS,</p>

		→ Kepentingan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok
--	--	---

3.1. Faktor Lingkungan Pengambilan Keputusan

Pada faktor ini penulis menggunakan variabel *level of analysis* dengan unit grup atau dalam tulisan ini kabinet. Kabinet merupakan suatu jajaran menteri yang bekerja dibawah Presiden dan Wakilnya sebagai bagian dari lembaga eksekutif nasional. Menteri-menteri ini dipilih langsung oleh presiden untuk membantu tugasnya dalam menjalankan negara tersebut. Peranana menteri-menteri ini akan mendukung visi-misi Presiden dan Wakilnya. Sesuai dengan latar belakang linimasa tulisan ini maka penulis akan mengangkat kabinet pada periode kepemimpinan Joko Widodo tahun 2019-2024.

Pada periode pemerintahan Joko Widodo tahun 2019-2024 menyusun kabinet yang dinamakan Indonesia Maju yang dilantik pada tanggal 30 Oktober 2019 melalui ketetapan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113/P tahun 2019. Dalam penetapan ini Presiden Jokowi menetapkan 30 menteri diantaranya terdapat 4 Menteri koordinator. Setiap menteri menjalankan tugasnya masing-masing sesuai tupoksi yang telah diberikan (Presiden Republik Indonesia n.d.). Melalui jajaran menteri ini visi misi presiden akan direalisasikan melalui beberapa program berdasarkan tupoksi. Joko Widodo juga menegaskan dalam rapat sidang kabinet paripurna sehari setelah pelantikan menteri-menterinya. Dalam rapat ini Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada visi-misi menteri melainkan

hanya ada visi-misi presiden dan wakilnya. Ia juga mengatakan bahwa jika terjadi suatu perubahan maka dapat diupayakan melalui rapat sembari menekankan bahwa Kabinet Indonesia Maju merupakan bentuk kerja tim (PDSI KOMINFO 2019).

Sehingga prosedur Kabinet Indonesia Maju dapat dikatakan struktural mengikuti arahan presiden dan wakilnya serta disusun dengan empat menteri koordinator. Kemudian diantara 30 menteri tersebut beberapa menteri memiliki kapabilitas dan tanggung jawab dalam merespon AUKUS. Terutama dalam tulisan ini penulis akan menyoroti beberapa menteri dan jajaran eksekutif lainnya untuk dijadikan tingkat analisis dalam kognitif konsistensi keputusan-keputusannya. Pemilihan ini akan dilakukan secara acak dengan mengacu pada kapabilitas dan tupoksi masing-masing sesuai dengan pembahasan pada tulisan ini. Untuk melihat visi-misi Presiden Joko Widodo terutama dalam hal politik luar negerinya akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

3.2. Faktor Psikologi

Untuk melihat FPDM Indonesia pada kabinet ini terutama pada faktor psikologi dengan variabel kognitif konsistensi bisa dilihat dalam visi misi menteri luar negeri Indonesia. Konsistensi kognitif ini terbentuk dilandasi falsafah luar negeri Indonesia bebas aktif termasuk pada periode pemerintah berjalan pada saat ini dan periode kemarin. Joko Widodo sendiri menjadi presiden sekaligus membawa beberapa menteri yang sama pada periode 2014-2019 hingga periode saat ini 2019-2024. Pada periode pertamanya Joko Widodo menegaskan pandangan polugrinya pada saat berpidato di sidang MPR tanggal 20 November 2014. Pada sidang tersebut ia mengatakan “sebagai negara terbesar di Asia

Tenggara akan terus menjalankan polugri yang bebas aktif”. Dengan pandangan polugri ini Presiden Jokowi berharap dapat “menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Waluyo 2014). Penerapan bebas aktif pada periode Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seperti salah satunya pada program diplomasi ekonomi yang menyongsong *tagline zero-enemy*. Diplomasi ekonomi ini bertujuan untuk membuka pasar domestik ke dunia internasional serta untuk dapat menarik minat para investor luar negeri agar menaruh modalnya di Indonesia. Adapun sederet capaian yang telah yaitu penyelenggaraan Asia-Africa forum 2018, Indonesia Fair 2018 bertempat di Bangladesh, Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia dan Annual Meeting IMF di Bali pada tahun 2018. Salah satu program atau visi-misi luar negeri Joko Widodo ini kemudian diadaptasi kembali pada kepemimpinannya di periode 2019-2024 (Kompas Cyber Media 2018).

Program diplomasi ekonomi era Joko Widodo ini didasari oleh konsep polugri ini tertaut dalam undang-undang nomor 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri Indonesia. Dalam pasal 1 polun sendiri diartikan sebagai (*UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 1999*);

Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Dalam undang-undang ini juga pada pasal 3 dijelaskan bahwa prinsip bebas aktif akan menjadi prinsip polugri Indonesia yang diabadikan dalam kepentingan nasionalnya. Prinsip bebas aktif ini diserap dari pandangan Mohammad Hatta ketika menyampaikan pidatonya. Pidato yang berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang” disampaikan pada sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 2 September 1948 (Rosa 2022). 74 tahun berselang pidato ini menjadi landasan Indonesia dalam menentukan sikap polugrinya. Menyusun diksi bebas aktif hal ini kemudian tercantum dalam bagian penjelasan atas UU Nomor 37 Tahun 1999. Bebas aktif sendiri merupakan bukan bentuk polugri yang menjaga netralitasnya melainkan bebas dalam menentukan arah dan sikap kebijakannya. Bebas dimaksudkan terhadap ketidakterlibatan Indonesia dalam suatu kekuatan dunia baik secara pemikiran maupun berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan sengketa dan konflik. Sedangkan diksi “kepentingan nasional” dalam hal ini yang dimaksud polugri yang mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga poin besar polugri Indonesia diantaranya melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (ibid).

Landasan-landasan ini kemudian menjadi pandangan polugri Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo pada periode pertama hingga periode kedua. Pada periode kedua Presiden Jokowi melanjutkan amanah konstitusi tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi dalam pemaparannya terkait “Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024” pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 (Leba 2019). Dalam pemaparannya ini Menlu Retno juga menyampaikan terkait visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang satu

dan para menteri hanya menjalankannya sesuai dengan tupoksinya. Visi dan Misi ini serta Amanah UUD 1945 menjadi salah satu landasan dalam membentuk prioritas polugri Indonesia periode ini yang berprioritaskan pada “4+1”. Pada dasarnya prioritas 4+1 ini memuat empat prioritas lama pada periode sebelumnya dan satu prioritas baru. Prioritas-prioritas ini diantaranya penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, diplomasi dalam rangka meningkatkan peranan Indonesia di tingkat internasional dan prioritas baru dalam rangka meningkatkan infrastruktur diplomasi Indonesia (ibid).

Diantara lima prioritas ini penulis memilih dua prioritas sebagai bentuk implikasi prinsip bebas aktif pada variabel penangkalan (*deterrence*) dan kepentingan ekonomi. Kedua prioritas ini adalah penguatan diplomasi ekonomi dan diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Prioritas penguatan diplomasi ekonomi dapat ditempuh melalui meningkatkan kapitalisasi pasar domestik. Kemudian meningkatkan kemampuan pasar domestik dan internasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019). Melakukan peningkatan diplomasi dalam hal perdagangan dan investasi. Mendorong adanya promosi-promosi perdagangan, investasi serta mendorong *outbound investment*. Hingga yang terakhir melakukan optimalisasi kepentingan strategis ekonomi Indonesia melalui diplomasi. Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menjaga kedaulatan ini mengupayakan jalur melalui perundingan terlebih dahulu. Namun mengenai batas-batas kedaulatan Indonesia juga merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar (ibid).

Di lain kesempatan Menlu Retno menegaskan kembali makna bebas aktif polugri Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak yang berpersepsi bahwa bebas aktif bermakna netral. Dalam penutupan konferensi pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tanggal 16 November 2022 Retno mengatakan bahwa makna “bebas” memiliki arti bebas menentukan sikap. Ia juga menambahkan bahwa aktif sendiri dimaknai sebagai aktif berkontribusi demi mewujudkan perdamaian dunia (Cindyara and Sinaga 2022). Dengan mekanisme ini sudah jelas bahwa amanah konstitusi polugri bebas aktif akan diinterpretasikan menjadi lima prioritas tersebut. Dalam konteks penulisan ini, dua diantara lima prioritas menjadi analisis utama dalam melihat manuver polugri pemerintah Indonesia terhadap traktat pertahanan AUKUS. Dengan menetapkan tingkat analisis pada kabinet Indonesia Maju penulis menyortir beberapa aktor atau menteri secara acak terkait manifestasi bebas aktif dalam kebijakannya dalam merespon AUKUS.

Dalam dua periode masa kepresidenan Joko Widodo terlihat bahwa, Jokowi menggantungkan visi-misi luar negerinya secara konsisten dalam kurun 10 tahun menjabat Presiden Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip polugri bebas aktif sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia pada UU No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Prinsip ini kemudian diadaptasi pada periode 2014-2019 dengan empat prioritas dan ditambah satu prioritas lagi di tahun 2019-2024 (4+1). Salah dua prioritas program luar negeri Indonesia di dua periode masa kepresidenan Joko Widodo yang penulis gunakan adalah diplomasi ekonomi dan diplomasi kedaulatan kebangsaan. Pemilihan ini berkaitan dengan pengaplikasian polugri bebas aktif Indonesia pada subbab-subbab selanjutnya (Faktor Internasional dan Domestik). Dengan ini dapat dikatakan bahwa merujuk pada faktor lingkungan

pengambilan keputusan bahwa Kabinet Indonesia Maju mengikuti visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan mengimplikasikan prinsip bebas-aktif pada periode 2019-2024. Untuk itu penulis akan menyertai beberapa pernyataan dari menteri-menteri yang diambil secara acak berdasarkan tupoksinya untuk melihat implementasi bebas-aktif pada bab selanjutnya.

3.3. Faktor Internasional

3.3.1. Deterrence

Pada sub-bab ini akan menjabarkan terkait penangkalan yang dilakukan oleh Indonesia jika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pasca adanya perlombaan senjata. Perlombaan senjata di kawasan LNU akan dijelaskan pada sub-bab setelahnya. Kondisi perlombaan senjata ini sempat disinggung oleh Menlu Retno Marsudi dalam keterangan persnya tanggal 22 September 2021. Ia mengutip perkataan Sekjen PBB, Antonio Guterres yang menyatakan bahwa AUKUS dapat meningkatkan terjadinya perang dingin (Rizqo 2021). Situasi ini sudah seharusnya menjadi realita baru bagi Indonesia. Bahwa AUKUS sudah menyebabkan perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik. Seperti yang disinggung sebelumnya oleh Jokowi dalam KTT ASEAN-Australia terkait kekhawatirannya terhadap regional Indo-Pasifik sebagai *power projection* dan ajang perlombaan senjata bagi negara-negara besar. Hingga pada tulisan ini dibuat tidak ada indikasi pembatalan program AUKUS. Perjanjian yang sudah berjalan selama 13 bulan lamanya ini justru menunjukkan konsistensi perkembangannya. Pada laporan perkembangannya terdapat progress seperti laporan IAEA yang tidak mendeteksi adanya pelanggaran NPT dalam perjanjian ini. Markas atau stasiun kapal selam bertenaga nuklir juga

sudah berada dalam proses pembangunan. Dengan ini sudah seharusnya Indonesia melakukan kebijakan prioritasnya dalam diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Seperti yang dilakukan Retno Marsudi pada Hari Internasional NPT, 26 September 2022 di New York, AS. Pada pertemuan itu ia menyampaikan keprihatinan Indonesia yang meningkat terhadap komitmen pelucutan senjata nuklir yang semakin berkurang (Wardah 2022).

Prabowo Subianto selaku Menhan juga menyatakan hal yang serupa dalam forum *Institute for Strategic Studies* (IISS) tahun 2022. Pada hari Selasa, 14 Juni 2022 ia menyampaikan bahwa Indonesia secara historis jauh sebelum merdeka secara sadar untuk mengambil sikap bebas tidak terikat dalam afiliasi blok tertentu. Sebagai orang yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden ia juga menambahkan bahwa Indonesia menghormati negara-negara berkekuatan besar tersebut bagaimanapun juga jasa mereka memiliki peran dalam kemerdekaan Indonesia (Santoso 2022). Prabowo kemudian menceritakan peranan Australia, AS, dan Rusia pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak luput, Prabowo juga berbicara terkait hubungan Indonesia dengan Tiongkok yang diungkapkan sebagai rekan yang baik. Prabowo juga menekankan bahwa masing-masing negara memiliki prioritasnya sendiri-sendiri. Sederet pernyataan Menhan Prabowo yang bermakna bebas aktif ini juga ditekankan kembali ketika ia mengutip perkataan Nelson Mandela, musuhmu belum tentu juga menjadi musuhku (ibid). Rentetan pernyataan Prabowo ini merupakan wujud dari prinsip “bebas” dalam polugri bebas-aktif Indonesia.

Namun terdapat beberapa kebijakan Menhan Prabowo yang melakukan penangkalan berupa penguatan militer dan alutsistanya agar terhindar dari situasi

perang dingin ini. Dapat dilihat dari trend peningkatan anggaran belanja kemhan yang naik dari Rp 106,68 triliun di 2018, Rp 115,4 triliun di 2019 hingga 136,9 triliun pada tahun 2020. Sempat turun di angka Rp 125,9 triliun pada tahun 2021, anggaran belanja kemhan menjadi yang paling besar diantara kementerian-kementerian lainnya selama dua tahun berturut setelahnya yakni pada tahun 2022 Rp 133,4 triliun dan tahun 2023 Rp 134,32 triliun naik 2,4 triliun dari tahun sebelumnya. Anggaran pagu Kemhan ini diterima Prabowo setelah mendapatkan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 oleh Presiden Jokowi pada hari Kamis, 1 Desember 2022 di Istana Negara (Putri 2022). Jika melihat rata-rata dari empat tahun (2020-2024) keaktifan Prabowo menjadi Menhan dengan anggaran kemhan di tahun 2019 yang naik sekitar 14% atau sekitar Rp 17 triliun. Kenaikan dan sekaligus menjadi anggaran pembelanja terbesar Indonesia ini menjadi salah satu indikasi perhatian Menhan Prabowo terhadap peningkatan kapabilitas militer Indonesia. Anggaran pembelanjaan ini menjadikan Indonesia menjadi negara kedua terbesar di ASEAN dibawah singapore dengan anggaran militernya sebesar US\$ 9,7 miliar atau sekitar 135 triliun rupiah (ibid).

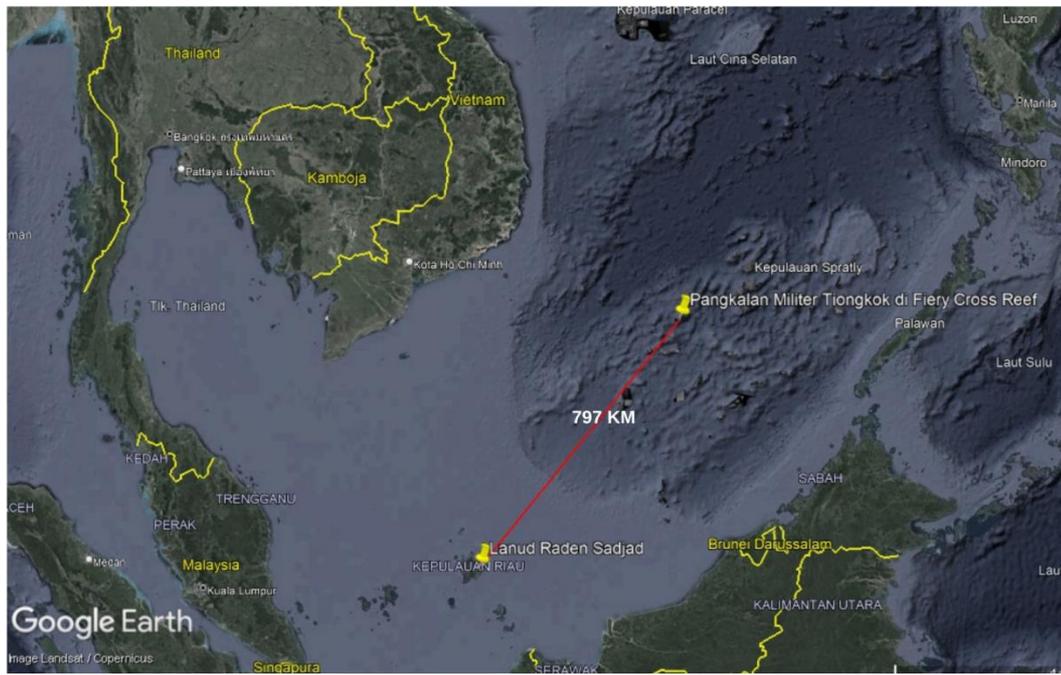
Menhan Prabowo memiliki visi-misi yang cukup signifikan dalam hal anggaran sepanjang tahun 2020-2024 dengan menggelontorkan dana 1.700 triliun rupiah dalam rencana pembelian alutsista. Ini termuat dalam draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Widyastuti 2021). Salah satunya dengan pembelian terbaru alutsista berupa pesawat jet tempur Rafale. Jet tempur produksi Prancis ini didatangkan sebanyak 42 unit dengan nilai total 8,1 miliar dollar setara dengan

116,2 triliun rupiah. Pembelian ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pesawat-pesawat tempur Indonesia yang sudah lawas seperti F-16 produksi AS dan pesawat tempur produksi Rusia Sukhoi Su-30. Ini dapat dilihat dari keunggulan Rafale seperti dapat membawa kapasitas senjata seberat 9 ton dengan manuver maksimalnya hingga 1.384 kilometer per jam. Kesepakatan pembelian ini disepakati setelah lima bulan pengumuman AUKUS atau tepatnya pada tanggal 10 Februari 2022. Di hari yang sama berita baik datang dari Kemlu AS yang menyepakati potensi pembelian Indonesia terhadap pesawat F-15ID dengan nilai 13,9 miliar dolar atau setara 200 triliun rupiah. Sederet wacana pembelian ini merupakan upaya Indonesia memperkuat militernya untuk mencegah adanya dampak agresi dari tensi yang muncul akibat AUKUS (BBC News Indonesia 2022).

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UNCLOS 1982 bahwa terdapat tiga perairan Indonesia yang menjadi wilayah perairan internasional salah satunya adalah Samudera Hindia-Selat Sunda Laut Tiongkok Selatan. Jalur ini merupakan salah satu corong (*choke points control*) strategis Indonesia yang bisa memunculkan potensi ancaman langsung dengan klaim Tiongkok *nine-dash line*. Sehingga sudah seharusnya Indonesia menjadikan lautnya menjadi pusat pertahanan kedaulatannya. Kelebihan geografis Indonesia yang memiliki beribu-ribu pulau dapat dimanfaatkan dalam operasi militer kepulauan (*archipelagic warfare*). Pulau-pulau ini bisa dimanfaatkan sebagai pangkalan militer yang bertujuan untuk mengontrol perairan Indonesia. Dengan melakukan sinergitas sistem persenjataan dengan mengkombinasikan seperti salah satunya sistem pertahanan pantai dan serangan udara dapat memberikan dampak yang efektif untuk menjaga kedaulatan NKRI (Prasetyo, Saputra, and Supartono 2021).

Sederet pembelian alutsista berupa jet tempur ini sejalan dengan kondisi geopolitik dan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Terkait ancaman Tiongkok di LNU, Indonesia sendiri memiliki Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Raden Sadjad yang terletak di Kabupaten Natuna. LANUD Raden Sadjad akan berhadapan langsung di sebelah utara dengan klaim Tiongkok di LNU. Jika nantinya Rafale dan F-15ID akan ditempatkan dalam LANUD Raden Sadjad maka masing-masing dapat menjangkau hingga 3.700 KM dan 2.762 KM radius terbang di perairan LNU. Dengan jarak tempuh ini Rafale dapat terbang hingga dataran Tiongkok dan juga Darwin jika *take off* dari LANUD Raden Sadjad. Kemampuan kedua jet tempur ini sudah dapat menjangkau seluruh wilayah konflik LNU dengan klaim Tiongkok di Laut China Selatan. Sebagai gambaran LANUD Raden Sadjad berjarak 797 kilometer dari salah satu pangkalan militer Tiongkok di Kepulauan Spratly tepatnya di Fiery Cross Reef.

Gambar 3. Peta Jarak antara LANUD Raden Sadjad di Kabupaten Natuna dengan Salah Satu Pangkalan Militer Tiongkok di LNU, Kepulauan Fiery Cross Reef.



Sumber: diolah dari Google (2015)

3.3.2. *Arm Races*

Latar belakang terbentuknya AUKUS merupakan bentuk dari serangkaian implementasi strategi ketiga anggotanya. Sebagai tujuan besar AUKUS secara langsung hadir sebagai penantang Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya tujuan AUKUS salah satunya ingin membuka kawasan Indo-Pasifik sebeb-bebasnya untuk dapat diakses berdasarkan konvensi internasional. Ini merupakan bentuk singgungan kepada Tiongkok terhadap aksinya yang telah melanggar hukum perairan Internasional terkait penetapan ZEE yang tercantum dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Keinginan AS untuk dapat mengakses kawasan

Indo-Pasifik ini ditempuh dengan mewujudkan adanya *balance of power* pada kawasan tersebut. Sehingga langkah untuk membentuk traktat pertahanan ini menjadi wajar terutama dengan adanya Australia yang langsung berhadapan dengan Tiongkok di sebelah utara. Maka dari itu transfer teknologi berupa kapal selam bertenaga nuklir dan wacana pembangunan markas atau stasiunnya kepada Australia menjadi krusial.

Gambar 4. Peta Kemampuan Kapal Selam Bertenaga Nuklir Berpatroli di Wilayah Indo-Pasifik



Sumber: The Economist (2021)

Kapal selam bertenaga nuklir merupakan lonjakan yang pesat dalam hal angkatan laut Australia. Dengan adanya alutsista baru ini membuat kemampuan eksplorasi maritim lebih pesat. Dengan kemampuan yang minim suara, memiliki estimasi jarak tempuh yang lebih jauh daripada kapal selam bertenaga disel memungkinkan Australia untuk melakukan eksplorasi kemana saja pada kawasan Indo-Pasifik. Kapal selam bertenaga nuklir juga dapat mengintai aktivitas militer Tiongkok di LNU selama 77 hari lamanya tujuh kali lipat jika dibandingkan dengan kapal selam dengan penggerak diesel. Kondisi ini membuat perubahan total pada strategi militer maritim Australia. Kemampuan kapal selam bertenaga nuklir ini juga nantinya membuat jarak tempuh angkatan laut Australia lebih jauh mulai dari mengitari perairan penting selat malaka hingga utara jauhnya di perairan Taiwan. Tidak hanya itu kelebihan yang dimiliki kapal selam ini dapat menembakan rudal dari Filipina hingga daratan utama Tiongkok (The Economist 2021).

Sederet kemampuan kapal selam bertenaga nuklir ini membuat mau-tidak-mau tensi rivalitas Tiongkok dan AS tercurahkan dalam kawasan Indo-Pasifik. Jika melihat pada gambar 1 wilayah yang disengketakan Tiongkok dan negara-negara ASEAN terjamah dengan sempurna oleh kapal selam bertenaga nuklir Australia nanti. kekuatan Tiongkok terlebih dahulu hadir di wilayah LNU dengan sederet pembangunan markas militernya di pulau-pulau kecil. Menurut Laksamana AS di Indo-Pasifik John C Aquilino, menyatakan bahwa terdapat pangkalan militer Tiongkok yang memiliki fitur lengkap di Mischief Reef, Spratly Island. Pulau ini didesain dengan perlengkapan misil penangkal kapal dan pesawat. Tidak hanya itu,

pulau ini juga memiliki kemampuan *lesser jamming* serta terdapat beberapa pesawat tempur didalamnya (Associated Press 2022).

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan pangkalan militer ini menjadi pembangunan terbesar pasca terjadinya perang dunia kedua selama 20 tahun silam. Aquilino menuding bahwa intensi Tiongkok ini dapat mengganggu kestabilan kawasan. Perlu diketahui bahwa Tiongkok telah menjadi negara kedua dengan *budget* militer terbesar di seluruh dunia tepat di bawah AS. Modernisasi militer Tiongkok ini dapat dilihat dengan adanya penambahan alutsista seperti *stealth jet fighter* J-20, dua kapal induk dengan tiga yang masih dibangun dan misil hipersonik. Unit patroli AS P8-Poseidon juga menemukan terdapat 40 kapal perang Tiongkok di sekitar Spratly Island. Laksamana Aquilino mengatakan bahwa pulau-pulau tersebut berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serang Tiongkok di luar daratan utamanya. Hal ini dilakukan dengan sederet kemampuan militernya berupa *fighter jet*, *bombers* dan beberapa misil yang dimilikinya. Ini merupakan ancaman dan kondisi yang memprihatinkan bagi negara-negara yang beroperasi di sekitar kawasan LNU menurut Aquilino (ibid).

Dapat dikatakan bahwa *update* hasil pemantauan Laksamana AS di Indo-Pasifik John C Aquilino tersebut merupakan bentuk perlombaan senjata pasca diratifikasinya AUKUS. Memang betul Tiongkok mengembangkan pangkalan militernya di LNU jauh sebelum hadirnya AUKUS di kawasan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemunculan kekuatan yang lebih kuat di kawasan tersebut membuat Tiongkok merespon dengan kebijakan keamanan. Tiongkok mengatakan bahwa AUKUS meremehkan keamanan dan kestabilan regional serta dapat

memicu perlombaan senjata dan pelanggaran NPT. Beijing juga mengkritisi sikap AS yang mengungkit mentalitas-mentalitas *zero-sum* ala perang dingin.

3.4. Faktor Domestik (Kepentingan Ekonomi)

Pada dasarnya tujuan diplomasi ekonomi bertujuan untuk mengoptimalkan kepentingan strategis ekonomi Indonesia. Di bagian sebelumnya terlihat bahwa ketidakberpihakan Indonesia dalam salah satu blok menyebabkan kemudahannya dalam melakukan diplomasi ekonomi seperti pembelian alutsista jet tempur. Pembelian alutsista ini relatif berhubungan dengan blok AUKUS seperti F-15ID di AS dan Rafale dari Prancis yang merupakan bagian dari *The North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Perlu digarisbawahi bahwa pembelian alutsista ini tidak serta merta terkait dengan pasar bebas namun terdapat faktor-faktor *assessment* seperti tahapan potensi pembelian pada kasus F-15ID yang harus terlebih dahulu disepakati sebelum secara resmi membelinya. Sehingga peranan diplomasi ketidakberpihakan atau “bebas” dari afiliasi blok-blok menjadi poin yang krusial terhadap pembelian alutsista. Tidak hanya itu, dalam bagian sebelumnya juga menyatakan bagaimana kedekatan Indonesia dan Tiongkok yang dinarasikan sebagai rekan baik oleh Menhan Prabowo. Dalam bagian ini penulis menganalisis ketidakberpihakan Indonesia dalam manuver diplomasi ekonominya seperti frasa “Mendayung di antara Dua Karang”. Kepentingan ekonomi Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Indonesia Maju terdapat pada dua blok besar Tiongkok dan AS.

3.4.1. Indonesia dengan AS

Strategi AS dalam menentang keberadaan Tiongkok di Indo-Pasifik tidak hanya dengan melakukan pendekatan-pendekatan militer. AUKUS merupakan salah satu bentuk saja, terdapat IPEF sebagai bentuk rantai kerjasama yang dibentuk AS terhadap negara-negara di Indo-Pasifik tidak terkecuali Indonesia. Indonesia menyambut langkah kerjasama ini dengan baik. Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (MKBP) Airlangga Hartarto dalam pertemuan bilateralnya dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo ketika melakukan lawatan ke AS mendukung adanya kerjasama IPEF dalam rangka untuk menggenjot volume perdagangan Indonesia dengan AS hingga 60 miliar dollar. Ia juga menekankan bahwa perdagangan Indonesia dengan AS saat ini hanya menyentuh angka 37 miliar dolar dimana dengan adanya IPEF merupakan peluang untuk menggenjot kenaikan volume perdagangan. Dalam pertemuan pada hari Kamis, 8 Oktober 2022 tersebut juga membahas tentang kesiapan dana segar AS yang digelontorkan untuk mendorong industri semikonduktor di Indonesia (Dharmasaputra 2022). Hal ini termuat dalam program CHIPS dimana AS telah menyiapkan dana sebesar 50 miliar dolar dalam berinvestasi. Menlu Raimondo memastikan bahwa Indonesia akan kecipratan dana segar tersebut. Ia juga menunjukkan komitmennya ini dengan mengajak perusahaan-perusahaan besar AS agar dapat berinvestasi di Indonesia (ibid).

Selain itu pada tahun 2021 AS berencana melakukan investasi bilateral dengan Indonesia pada sektor migas yang diancang-ancang menjadi investasi AS terbesar kedua setelah Freeport. Melalui menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Kamis, 4 November

2021 telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan perusahaan asal AS yaitu *Air Products and Chemicals Inc* (APCI) di Dubai, UEA. Dalam Nota Kesepahaman tersebut Indonesia akan menerima investasi sebesar 13 hingga 15 miliar dolar atau setara dengan 185 sampai 213 triliun rupiah. Komitmen investasi APCI di Indonesia terletak pada sektor hilirisasi pertambangan batu bara seperti pengolahan batubara dengan kalori rendah menjadi *Dimethyl Ether* (DME), dan produk lainnya yang dapat mensubstitusi LPG. Bahlil mengatakan bahwa investasi ini penting untuk meminimalisir impor LPG sehingga dapat mengalokasikan devisa ke lain hal (Umah 2021b). Investasi oleh APCI ini mendorong kenaikan yang sangat signifikan terhadap realisasi investasi AS di Indonesia.

Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya nilai realisasi investasi AS di Indonesia hanya di angka 740 juta dollar sedangkan pada tahun 2021 melonjak hingga 2,5 miliar dolar atau naik 230%-an. Pada tahun 2022 sendiri AS melalui Presiden Biden mengutarakan komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita *net-zero* emisi karbon Indonesia di tahun 2060 atau mungkin lebih cepat (Reuters 2022). Komitmen ini disampaikan saat KTT G20 berlangsung dengan iming-iming Presiden Biden menggelontorkan dana 2.5 miliar dollar atau 38,82 triliun rupiah melalui kerjasama perusahaan migas ExxonMobil dengan Pertamina. Terlepas dari wacana investasi yang drastis, nilai realisasi investasi AS sendiri di tahun 2022 hingga tulisan ini dibuat berada di angka 2,1 miliar dolar. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya sekitar 400 juta dollar atau 15% (BPKM 2022).

3.4.2. *Indonesia dengan Tiongkok*

Jika AS memiliki IPEF, Tiongkok memiliki kerjasama regionalnya sendiri yaitu RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*). Kondisi kerangka kerjasama ini sama yaitu dengan melibatkan ASEAN dan negara-negara besar di regional Indo-Pasifik namun AS dan Tiongkok tidak berada dalam badan yang sama. Terdapat 13 negara yang telah meratifikasi RCEP pada akhir tahun 2021 diantaranya adalah tujuh negara ASEAN seperti Laos, Singapura, Myanmar, Vietnam, Brunei, Kamboja dan Thailand. Sementara itu lima lainnya merupakan mitra dagang ASEAN seperti Tiongkok, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru dan Jepang. Indonesia sendiri baru meratifikasi perjanjian ini pada pertengahan tahun 2022 tepatnya pada tanggal hari Selasa, 30 Agustus setelah rapat paripurna DPR. 11 Tahun setelah Indonesia menginisiasi kerangka kerjasama ini ketika menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2011. Penetapan ini membuat Indonesia menjadi negara ke-14 yang meratifikasi kerangka kerjasama ekonomi regional tersebut. Airlangga Hartarto selaku MKBP menyambut baik hal ini dengan mengatakan dalam konferensi pers virtual bahwa RCEP dapat meningkatkan pertumbuhan PDB Indonesia sebanyak 0,07% di tahun 2040. Pada konferensi pers virtual yang digelar di Singapura, 31 Agustus 2022 tersebut Airlangga juga mengatakan dengan sah-nya Indonesia bergabung dalam RCEP membuka peluang untuk mangkses pasar baru Tiongkok di berbagai sektor. Dengan ini Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekspor hingga 5,01 miliar dan 2,5 kali lipat mengalami surplus perdagangan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia 2022).

Selain dalam bentuk kerangka kerjasama, Indonesia memiliki sederet kerjasama secara langsung dengan Tiongkok di berbagai sektor. Seperti pada sektor transportasi, Tiongkok telah berinvestasi pada proyek kereta cepat Jakarta - Bandung yang dimulai pada akhir tahun 2015. Investasi pada proyek ini tercatat hingga mencapai 3,96 miliar dolar atau 56 triliun rupiah (Gunawan 2022). Pada bidang pengolahan nikel Tiongkok melalui perusahaan Tsingshan Steel Holding melakukan merger dengan PT Bintang Delapan Mineral menjadi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Melalui PT IMIP Tiongkok pada tahun 2020 tercatat telah berinvestasi mencapai 10,20 miliar dolar atau setara dengan 147 triliun rupiah. Ditahun yang sama pendapatan ekspor IMIP mencapai 6,4 miliar dollar sekitar 94,7 triliun rupiah dengan sumbangsih pajak dan royalti ke Indonesia mencapai 5,38 triliun rupiah atau sekitar 5% dari pendapatan ekspornya (Umah 2021a). Hingga yang terbaru pada dihari yang sama ketika Presiden Biden menunjukkan komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia begitupun dengan Tiongkok.

Pada rangkaian pertemuan KTT G20 2022 terdapat forum investasi B20 yang berlangsung pada 13 hingga 14 November. Pada pertemuan ini Tiongkok masih menunjukkan komitmennya untuk berinvestasi terlepas pernyataan Indonesia yang mendukung kerangka kerjasama IPEF. Wacana investasi kali ini datang dari salah satu produsen *ternary precursor* asal Tiongkok CNGR *Advanced Material Co Ltd.* melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian BKPM senilai 5 miliar dolar atau sekitar 74 triliun rupiah untuk mensuport pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia (CNN Indonesia 2022). Sederet contoh komitmen investasi Tiongkok ini menempatkan posisinya menjadi 5 negara

terbesar yang menaruh modalnya di Indonesia. Tercatat pada periode 2015 hingga pada triwulan III 2020 Tiongkok menjadi negara tiga terbesar yang melakukan PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 17,29 miliar dolar. Jumlah investasi Tiongkok ini sejalan dengan peningkatan nilai investasinya selama lima tahun yang mencapai 559 persen dari 063 miliar dolar di tahun 2015 hingga 3,51 miliar dollar di tahun 2020 (Noviyanti 2021). Angka realisasi nilai investasi Tiongkok sempat turun di tahun 2021 di angka 3,1 miliar dolar kemudian naik 70% di tahun 2022 ketika tulisan ini dibuat di angka 5,1 miliar dolar. Nilai ini dua kali lipat lebih besar dari realisasi investasi AS di tahun 2022.

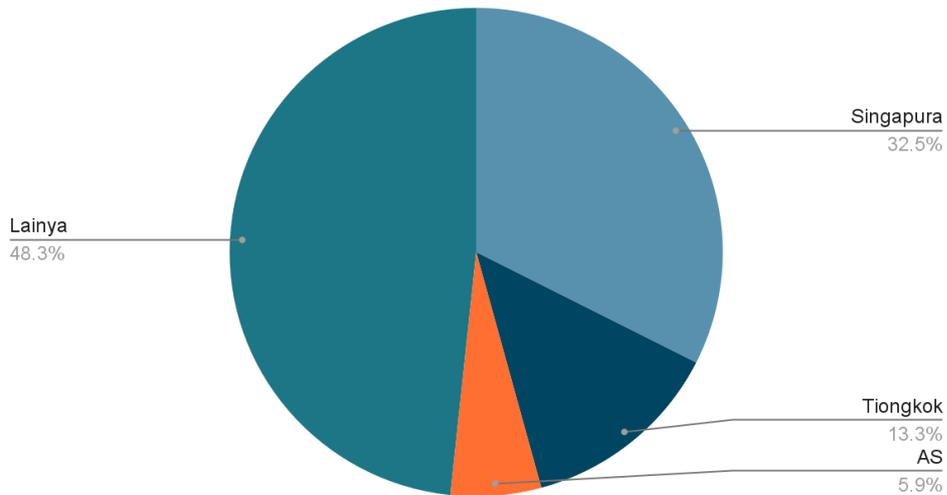
Meskipun angka investasi lebih banyak datang dari Tiongkok dapat dilihat bahwa Indonesia tidak juga menutup kemungkinan untuk berhubungan dengan AS atau AUKUS-nya. Ketidakberpihakan ini merupakan konsep polugri “bebas” yang diinterpretasikan dalam diplomasi ekonomi. Salah satu tujuan diplomasi ekonomi pada masa Kabinet Indonesia Maju adalah peningkatan diplomasi dalam hal perdagangan dan investasi yang dimana terealisasi sebagaimana upaya ketidakberpihakan Indonesia dalam satu blok saja. Secara mendasar sikap bebas-aktif Indonesia dari sisi kepentingan ekonomi ini merupakan wujud mengoptimalkan strategi Indonesia.

Sebagai gambaran dampak sikap polugri Indonesia ini pada laporan realisasi investasi oleh Kementerian BKPM pada triwulan III mencatatkan PMA yang telah diterima Indonesia sejumlah 168,9 triliun rupiah (Kementerian Investasi/BKPM 2022). Kontribusi Tiongkok hingga Triwulan III 2022 tercatat berjumlah 1,6 miliar dolar atau sekitar 22 triliun rupiah 13,3% dari keseluruhan PMA. Sedangkan AS 0,7 miliar dolar atau setara 10 triliun rupiah menyumbang

5,9% dari keseluruhan realisasi PMA. Sedangkan posisi teratas ditempati Singapura menyumbang 32,5 % dari keseluruhan dengan total 3,8 miliar dolar atau setara 54 triliun rupiah (ibid). Dengan posisi tidak memihak antara Tiongkok maupun AS Indonesia dalam kepentingan ekonominya terkhususkan PMA sudah mengamankan dana sebesar 32 triliun rupiah hampir 20% dari keseluruhan realisasi PMA pada Triwulan III tahun 2022.

Grafik 1. Realisasi PMA pada Triwulan II tahun 2022

Realisasi PMA pada Triwulan III tahun 2022



Sumber: diolah dari Kementerian Investasi/BKPM (2022)

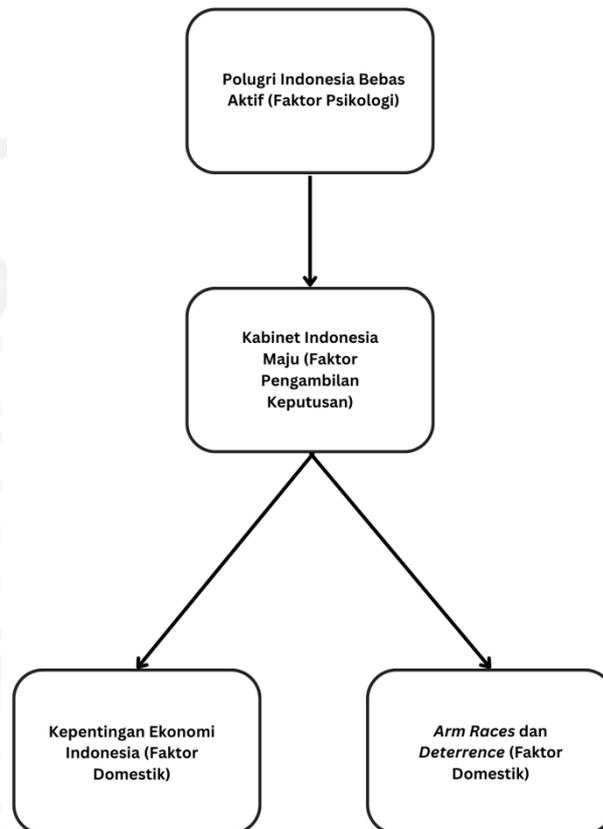
BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

4.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis kebijakan Indonesia terhadap traktat AUKUS, Indonesia berpegang teguh terhadap landasan poligrinya, bebas aktif. Konsistensi penggunaan nilai ini (kognitif) terlihat pada penggunaannya dalam kurun waktu 72 Tahun atau tepatnya ketika bung Hatta menyampaikan pidatonya pada tanggal 2 September 1948. Kabinet Indonesia Maju sebagai tingkat analisis penulis pada tulisan ini juga terlihat mengadaptasi bebas-aktif menjadi beberapa prioritas. Seperti apa yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi pada “Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024 Selasa, 29 Oktober 2019 terdapat “4+1” prioritas. Dari lima prioritas tersebut penulis menggarisbawahi dua diantaranya yaitu diplomasi ekonomi dan diplomasi kedaulatan dan kebangsaan.

Gambar 5. Mind Map Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Traktat Pertahanan AUKUS 2021-2022



Pada tulisan ini kesimpulan pertama yang dapat dibuat adalah Indonesia dalam kebijakannya terhadap traktat pertahanan AUKUS sangat beracuan pada faktor psikologisnya berupa konsistensi kognitif prinsip polugri bebas aktif. Penulis melihat bahwa akar visi Indonesia kemudian diadaptasi pada Kabinet Indonesia Maju (faktor lingkungan pengambilan keputusan) dalam program prioritas diplomasi “4+1”. Visi prioritas diplomasi ini juga menghimpun variabel kepentingan ekonomi dalam visi diplomasi ekonomi dan begitupun dengan variabel *Deterrence* dan *Arm Races* pada visi diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan.

Dalam variabel *arm races*, kehadiran AUKUS dalam kawasan Indo-Pasifik dengan membawa fitur militer seperti kapal selam bertenaga nuklir tentu saja membuat perlombaan senjata atau bahkan penggunaan nuklir di kawasan. Hal ini kemudian disinggung oleh Tiongkok sebagaimana mereka menyebut langkah AUKUS adalah mentalitas perang dingin. Ini membuat Indonesia yang juga telah bersengketa dengan Tiongkok terkait LNU, mengambil langkah penangkalan (*Deterrence*). Sejumlah lawatan dan rencana pembelian Alutsista seperti F-15ID dan Rafale dilakukan untuk menangkal adanya hal-hal yang tidak diinginkan akibat peningkatan tensi kawasan. Terdapat adanya tren peningkatan pagu belanja kemhan dari 2021 hingga tahun 2023 dan sekaligus menjadi yang terbesar dari jajaran kementerian lainnya dapat dikatakan sebagai indikasi peningkatan perhatian terhadap keamanan kedaulatan bangsa Indonesia. Tentu saja ini dilatarbelakangi dengan serangkaian fenomena ancaman keamanan tradisional yang semakin meningkat seperti pada wilayah LNU.

Namun Indonesia sendiri tetap mengambil posisi yang tidak terlibat dalam kelompok tertentu atau bebas. Sikap ini dapat dilihat pada sederet pernyataan Prabowo yang tidak menunjukkan adanya indikasi Indonesia untuk membela sisi AS dengan AUKUS-nya atau Tiongkok. Disatu sisi Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi aktif mendorong adanya kesadaran terhadap komitmen pelucutan penggunaan nuklir yang semakin berkurang. Kedua sikap ini secara langsung menyimpulkan posisi Indonesia yang bebas namun aktif untuk mendorong kedamaian dunia. Kondisi ini juga terlihat dalam variabel kepentingan ekonomi Indonesia yang dimana juga melibatkan kedua kubu yaitu AS dan Tiongkok. Sebagaimana pada peningkatan peranan Indonesia di tingkat internasional,

Indonesia sendiri dalam diplomasi ekonominya bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi Indonesia dengan cara bergabung dalam kerangka kerjasama Tiongkok dengan yaitu RCEP dan AS dengan AUKUS-nya dalam IPEF. Sebagaimana yang dimaksud kedua kerangka kerjasama ini merupakan wujud *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Tidak hanya itu kepentingan ekonomi Indonesia dengan dua negara itu sangat besar terutama dalam bidang investasi atau penanaman modal. AS sendiri menyumbang sekitar 5,9% atau 10 triliun rupiah dari total keseluruhan realisasi nilai investasi pada triwulan ke-tiga. Tiongkok sendiri berkontribusi dengan total investasi sebesar 22 triliun rupiah atau sekitar 13,3% dari keseluruhan. Kedua negara ini telah berkontribusi hampir 20% dari keseluruhan nilai investasi pada triwulan III tahun 2022. Kontribusi kedua negara ini sangat diperlukan untuk membangun investasi di Indonesia (lihat diagram 1). Sehingga pengambilan kebijakan yang tidak condong pada satu kubu di antara dua negara tersebut dibutuhkan untuk menggaet dana segar dari keduanya. Maka dari itu kebijakan Indonesia terhadap traktat pertahanan AUKUS 2021-2022 dapat dikatakan tidak berpihak (bebas) namun aktif mendorong perdamaian dunia, menjaga kedaulatan dan kebangsaan Indonesia serta memaksimalkan kepentingan ekonomi Indonesia ditengah tensi kawasan Indo-Pasifik yang meningkat.

4.2.Saran

Langkah yang diambil Indonesia terkait kehadiran traktat pertahanan AUKUS merupakan langkah yang tepat jika mengacu pada konstitusi negara Indonesia. Amanah polugri bebas-aktif ini menurut penulis adalah landasan yang

penting untuk menempatkan sikap Indonesia dalam konstelasi politik Internasional. Seperti pemaparan sebelumnya, landasan polugri Indonesia menempatkan dirinya untuk tidak terlibat kubu satu atau yang lain sehingga dapat memaksimalkan kepentingan Indonesia di antara kubu-kubu tersebut. Manfaat landasan polugri bebas aktif ini membuat Indonesia secara harfiah “mengayuh diantara dua karang”. Atau, dapat dikatakan bahwa Indonesia tetap bisa memanfaatkan peluang-peluang hubungan diplomasi dan kerjasama baik dengan AS maupun Tiongkok seperti dalam bidang ekonomi, pertahanan atau lainnya.

Namun perlu digarisbawahi terkait keberadaan AUKUS yang meningkatkan ketegangan kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara yang terletak dalam kawasan tersebut, sudah seharusnya Indonesia menaruh perhatian lebih terhadap hal-hal yang mengancam kedaulatannya. Pembelian alutsista berupa pesawat jet Rafale dan F-15ID merupakan langkah yang sudah tepat namun perlu adanya peningkatan kemampuan militer kembali. Disisi lain Indonesia sebagaimana keinginannya untuk *always wants to be part of solution* dapat terimplikasikan dengan cara melakukan lawatan ke AS maupun Tiongkok untuk menurunkan tensi kawasan Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2022. "Buku Metode Penelitian Kualitatif." OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.
- Adamy, Muhammad Ilham Ramandha. 2022. "AUKUS and Australia's Nuclear-Powered Submarine: A Reinforced Strategic Culture." *Jurnal Hubungan Internasional* 15 (1): 148–65. <https://doi.org/10.20473/jhi.v15i1.33817>.
- Aini, Nur. 2021. "China: Pakta Pertahanan AUKUS Picu Konfrontasi." 20-2. *Republika Online*. September 30, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/r0729u1662886496/china-pakta-pertahanan-aukus-picu-konfrontasi>.
- Associated Press. 2022. "China Has Fully Militarized Three Islands in South China Sea, US Admiral Says." *The Guardian*, March 21, 2022, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/china-has-fully-militarized-three-islands-in-south-china-sea-us-admiral-says>.
- BBC News Indonesia. 2022. "Jet tempur Rafale buatan Prancis, apa istimewanya?" *BBC News Indonesia*, February 11, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60343367>.
- Bimo, Edwin Shri. 2021. "KTT ASEAN - Australia: Indonesia Khawatir Aliansi AUKUS akan Picu Perlombaan Senjata di Indo-Pasifik." *KOMPAS.tv*. October 27, 2021. <https://www.kompas.tv/article/226062/ktt-asean-australia-indonesia-khawatir-alianse-aukus-akan-picu-perlombaan-senjata-di-indo-pasifik>.
- BPKM. 2022. "NSWI." BPKM. December 2022. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik.
- Cabinet Office. 2021. "Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy." *GOV.UK*. July 2, 2021. <https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy>.
- Camroux, David. 2021. "AUKUS: Why Britain Was the Big Winner." *The Diplomat*. February 12, 2021. <https://thediplomat.com/2021/12/aukus-why-britain-was-the-big-winner/>.
- Cindyara, Aria, and Yuni A. Sinaga. 2022. "Menlu Retno Tegaskan Makna 'Bebas-Aktif' Polugri Indonesia Di G20." *Antara News*. November 16, 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/3248053/menlu-retno-tegaskan-makna-bebas-aktif-polugri-indonesia-di-g20>.
- CNN Indonesia. 2020. "Kronologi Perang Dagang AS-China Selama Kepemimpinan Trump." *CNN Indonesia*. October 4, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103154223-92-565387/kronologi-perang-dagang-as-china-selama-kepemimpinan-trump>.
- . 2022. "Daftar Investasi yang Diraih Indonesia di Sela KTT G20." *CNN Indonesia*. November 15, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221115102825-92-873843/daftar-investasi-yang-diraih-indonesia-di-sela-ktt-g20>.
- Defence Ministers. 2021. "Joint Media Statement: Australia to Pursue Nuclear-

- Powered Submarines through New Trilateral Enhanced Security Partnership |.” Australian Government of Defence. September 16, 2021. <https://www.minister.defence.gov.au/statements/2021-09-16/joint-media-statement-australia-pursue-nuclear-powered-submarines-through-new-trilateral-enhanced-security-partnership>.
- Delanova, Mariane Olivia. 2021. “DAMPAK PAKTA PERTAHANAN TRILATERAL AUKUS TERHADAP KONDISI REGIONAL INDO-PASIFIK.” *Jurnal Dinamika Global* 6 (02): 259–85. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408>.
- Dewi, Anisa. 2021. “RI Di Tengah Tensi Indo-Pasifik, China vs AUKUS.” CNN Indonesia. September 22, 2021.
- Dharmasaputra, Sutta. 2022. “RI Dukung IPEF, AS Dukung Investasi.” *kompas.id*. September 10, 2022. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/09/09/indonesia-dukung-ipef-as-dukung-investasi>.
- Gita-Carlos, Ruth Abbey. 2021. “Duterte ‘Concerned’ over AUKUS Nuclear Submarine Deal.” GOV.PH. September 28, 2021. <https://www.pna.gov.ph/articles/1154907>.
- Google. 2015. “Google Earth.”
- Gower, John, and Tanya Ogilvie-White. 2021. “A Deeper Dive into AUKUS: Risks and Benefits for the Asia-Pacific.” APLN. <https://www.apln.network/analysis/special-report/a-deeper-dive-into-aukus-risks-and-benefits-for-the-asia-pacific>.
- Gunawan, Indra. 2022. “Jokowi Bertemu Xi Jinping, Ini Daftar Proyek Jumbo China di RI.” *Bisnis.com*. July 27, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220727/45/1559764/jokowi-bertemu-xi-jinping-ini-daftar-proyek-jumbo-china-di-ri>.
- Hutapea, Rita Uli. 2021. “Australia Batal Pesan Kapal Selam Demi AS, Prancis Marah.” *detiknews*. September 16, 2021. <https://news.detik.com/internasional/d-5726744/australia-batal-pesan-kapal-selam-demi-as-prancis-marah>.
- Jones, Peter. 2021. “Towards a Biden Doctrine: US National Interest or Global Commitment?” *Rusi*. September 24, 2021. <https://www.rusi.orghttps://www.rusi.org>.
- Kaushal, Sidharth. 2021. “What Does the AUKUS Deal Provide Its Participants in Strategic Terms?” *Rusi.Org*. September 21, 2021. <https://www.rusi.orghttps://www.rusi.org>.
- Kementerian Investasi/BKPM. 2022. “Data Realisasi Investasi PMDN Dan PMA Triwulan III 2022.” BKPM. October 2022. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2461401/81401>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. 2022. “Gelar Konferensi Pers dari Singapura, Menko Airlangga Sampaikan Persetujuan RCEP dan Penguatan Kerja Sama Ekonomi - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” *Ekon.go.id*. August 31, 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4495/gelar-konferensi-pers-dari-singapura-menko-airlangga-sampaikan-persetujuan-rcep-dan-penguatan-kerja-sama-ekonomi>.

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. "Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024." Kemlu.go.id. October 29, 2019. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/725/pidato/penyampaian-prioritas-politik-luar-negeri-republik-indonesia-2019-2024>.
- Kompas Cyber Media. 2018. "Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam 4 Tahun, Apa Saja Pencapaiannya?" KOMPAS.com. October 20, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/17563621/politik-luar-negeri-jokowi-jk-dalam-4-tahun-apa-saja-pencapaiannya>.
- . 2020. "Letak dan Luas Indonesia Halaman all." KOMPAS.com. May 22, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/22/193000869/letak-dan-luas-indonesia>.
- Leba, Elsa Emiria. 2019. "Amanah Konstitusi dan Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia 2019-2024." kompas.id. October 30, 2019. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/30/amanah-konstitusi-dan-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia-2019-2024>.
- Li, Mingjiang. 2022. "ASEAN's Responses to AUKUS: Implications for Strategic Realignments in the Indo-Pacific." *China International Strategy Review*, November. <https://doi.org/10.1007/s42533-022-00121-2>.
- Massola, Chris Barrett, James. 2021. "Malaysia Warns AUKUS Pact Will Spark Nuclear Arms Race in Indo-Pacific." *The Sydney Morning Herald*. September 18, 2021. <https://www.smh.com.au/world/asia/malaysia-warns-aukus-pact-will-spark-nuclear-arms-race-in-indo-pacific-20210918-p58stm.html>.
- Minister for Foreign Affairs. 2021. "Australia to Pursue Nuclear-Powered Submarines through New Trilateral Enhanced Security Partnership." Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. September 16, 2021. <https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/australia-pursue-nuclear-powered-submarines-through-new-trilateral-enhanced-security-partnership>.
- Ministry of Foreign Affairs Malaysia. 2021. "ANNOUNCEMENT BY AUSTRALIA, UNITED KINGDOM AND THE UNITED STATES ON ENHANCED TRILATERAL SECURITY PARTNERSHIP – AUKUS." Kln.Gov.My. September 19, 2021. <https://www.kln.gov.my/web/guest/-/announcement-by-australia-united-kingdom-and-the-united-states-on-enhanced-trilateral-security-partnership-aukus>.
- Ministry of Foreign Affairs Singapore. 2021. "Prime Minister Lee Hsien Loong's Telephone Call with Australian Prime Minister Scott Morrison, 16 September 2021." Mfa.Gov.Sg. September 16, 2021. <http://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2021/09/20210916-PM-Call-With-Scott-Morrison>.
- Mintz, Alex, and Karl DeRouen. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making. Understanding Foreign Policy: Decision Making*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511757761>.
- Novita, Audry Anjani Danindra. 2022. "AUKUS Alliance: United States Strategic Interest in Indo-Pacific." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 8 (1). <https://doi.org/10.33172/jdp.v8i1.883>.
- Noviyanti, Sri. 2021. "Mengupas Kerja Sama Investasi China Di Indonesia." Kompas.Id. January 13, 2021.

- <https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di-indonesia>.
- PDSI KOMINFO. 2019. "Presiden: Tidak Ada Visi Misi Menteri, Yang Ada Visi Misi Presiden." Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. October 24, 2019. <http://content/detail/22359/presiden-tidak-ada-visi-misi-menteri-yang-ada-visi-misi-presiden/0/berita>.
- Perdana, Dyas Bintang, Rizaldi Dolly Ramasandi, and Maria Evangelina Setiawan. 2021. "Posisi Indonesia Terhadap Aliansi Amerika, Inggris Dan Australia (AUKUS) Dalam Perspektif Neorealisme." *DEFENDONESIA* 5 (2): 33–45. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v5i2.111>.
- Prakoso, Lukman Yudho. 2021. "AUKUS Peluang dan Kendala bagi Indonesia." *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 9 (3): 215–22. <https://doi.org/10.52307/jmi.v9i3.86>.
- Prasetyo, Yogo, Angga Faris Saputra, and S. Supartono. 2021. "OPERASI PENYELENGGARAAN PEPERANGAN KEPULAUAN SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI INDONESIA." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (3): 158–68. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.158-168>.
- Presiden Republik Indonesia. n.d. "Kabinet Indonesia Maju • Presiden RI." Presiden RI. Accessed January 22, 2023. <https://www.presidentri.go.id/kabinet-indonesia-maju/>.
- Priatna, P. 2019. "Diplomasi Indonesia Merangkul Indo-Pasifik." March 21, 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4477622/diplomasi-indonesia-merangkul-indo-pasifik>.
- Puspaningrum, Bernadette A. 2022. "Menlu Malaysia Kembali Ungkap Kekhawatiran tentang Pakta AUKUS Halaman all." KOMPAS.com. June 29, 2022. <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/29/200000370/menlu-malaysia-kembali-ungkap-kekhawatiran-tentang-pakta-aukus>.
- Putri, Cantika Adinda. 2022. "Anggaran Jumbo Prabowo Rp 134 T di 2023, Buat Apa Saja?" CNBC Indonesia. December 2, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221202102502-4-393190/anggaran-jumbo-prabowo-rp-134-t-di-2023-buat-apa-saja>.
- Reuters. 2022. "U.S. President Unveils Investments in Indonesia Carbon Capture, Transport." *Reuters*, November 14, 2022, sec. Carbon Markets. <https://www.reuters.com/markets/carbon/exxonmobil-pertamina-25-bln-indonesia-carbon-capture-agreement-white-house-2022-11-14/>.
- Rizqo, Kanavino Ahmad. 2021. "Menlu RI Kutip Sekjen PBB soal Potensi Perang Dingin Saat Singgung AUKUS." *detiknews*. September 22, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5735140/menlu-ri-kutip-sekjen-pbb-soal-potensi-perang-dingin-saat-singgung-aukus>.
- Rosa, Nikita. 2022. "Mengenal Politik Luar Negeri Indonesia: Prinsip hingga Landasan." *detikedu*. March 10, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5976954/mengenal-politik-luar-negeri-indonesia-prinsip-hingga-landasan>.
- Santoso, Audrey. 2022. "Prabowo Kutip Mandela Saat Ditanya soal Konflik Laut China Selatan." *detiknews*. June 14, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6126890/prabowo-kutip-mandela-saat-ditanya-soal-konflik-laut-china>

selatan.

- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6 (1): 41–53.
<https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- SIPRI. 2021. "Military Expenditure (Current USD)." The World Bank. 2021.
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?most_recent_value_desc=true.
- Swanström, Niklas, and Jagannath Panda Jagannath Panda Nagy. 2021. "AUKUS Resetting European Thinking on the Indo Pacific." Sweden: Institute for Security & Development Policy.
<http://isdpeu/content/uploads/2021/10/AUKUS-Resetting-European-Thinking-on-the-Indo-Pacific-9.11.21.pdf>.
- The Economist. 2021. "AUKUS Reshapes the Strategic Landscape of the Indo-Pacific." *The Economist*, September 25, 2021.
<https://www.economist.com/briefing/2021/09/25/aukus-reshapes-the-strategic-landscape-of-the-indo-pacific>.
- The White House. 2021a. "Remarks by President Biden on the End of the War in Afghanistan." The White House. August 31, 2021.
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/08/31/remarks-by-president-biden-on-the-end-of-the-war-in-afghanistan/>.
- . 2021b. "Joint Leaders Statement on AUKUS." The White House. September 15, 2021. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/15/joint-leaders-statement-on-aukus/>.
- . 2022a. "Indo-Pacific Strategy of United States." The White House. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>.
- . 2022b. "FACT SHEET: Implementation of the Australia – United Kingdom – United States Partnership (AUKUS)." The White House. April 5, 2022. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/05/fact-sheet-implementation-of-the-australia-united-kingdom-united-states-partnership-aukus/>.
- Umah, Anisatul. 2021a. "Industri Morowali Sudah Investasi Rp147 T, Ini Setoran ke RI." CNBC Indonesia. September 16, 2021.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210916103334-4-276736/industri-morowali-sudah-investasi-rp147-t-ini-setoran-ke-ri>.
- . 2021b. "Diteken di UEA, Air Products Deal Investasi DME di RI Rp213 T." CNBC Indonesia. November 11, 2021.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211111122644-4-290728/diteken-di-uea-air-products-deal-investasi-dme-di-ri-rp213-t>.
- UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*. 1999.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45358/uu-no-37-tahun-1999>.
- Waluyo, Andyala. 2014. "Politik Luar Negeri Bebas Aktif Masih Jadi Pijakan Pemerintahan Presiden Jokowi." VOA Indonesia. October 14, 2014.
<https://www.voaindonesia.com/a/politik-luar-negeri-bebas-aktif-masih-jadi-pijakan-pemerintahan-presiden-jokowi/2490867.html>.
- Wardah, Fathiyah. 2022. "Menlu Retno: Senjata Nuklir Ancaman Nyata Bagi

Kehidupan Umat Manusia.” VOA Indonesia. September 27, 2022.
<https://www.voaindonesia.com/a/menlu-retno-senjata-nuklir-ancaman-nyata-bagi-kehidupan-umat-manusia/6764878.html>.

Widyastuti, Rr Ariyani Yakti. 2021. “Kementerian Pertahanan Dapat Anggaran Terbesar Di 2022, Nilainya Rp 134 Triliun.” Tempo. August 17, 2021.
<https://bisnis.tempo.co/read/1495418/kementerian-pertahanan-dapat-anggaran-terbesar-di-2022-nilainya-rp-134-triliun>.

